

STRATEGI PERJUANGAN PETANI DALAM MENDAPATKAN AKSES DAN PENGUASAAN ATAS LAHAN

Farmer Struggle Strategy on Access and Land Tenure

Geidy Tiara Ariendi^{*)} dan Rilus A. Kinseng

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

**)Email : geidy_tiara@yahoo.co.id*

Diterima 14 Februari 2011/ Disetujui 30 Maret 2011

ABSTRACT

Farmers in Cisarua Village have limited access and land tenure because the land is own by government through plantation concertion (HGU). Those facts lead the farmers for setting strategy to get the access of land cultivate. Generally, this research used qualitative analysis methode which is done since July 2010 to January 2011. Depth interview, direct observation, and questionnaire are used to get primary data and literature study is used to get secondary data in this research. Sample taken as many as thirty four respondents with the population is Cisarua Society and the frame sample is Cisarua Society who work as farmer. The result of this research shows that Cisarua's farmer struggle individually by doing compromy with foreman of tea plantation so that they can get access of land tenure. Strategy choosing that's used by farmers is influenced by some external and internal factors.

Keyword: *Land limits, Strategy, Individual Struggle, Compromy*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris tentu menggantungkan masa depannya pada pertanian. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya penduduk Indonesia yang tinggal di perdesaan dengan matapencaharian sebagai petani. Namun sangat disayangkan kondisi petani di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya luas lahan yang dapat digarap oleh petani. Berdasarkan data tahun 1983 dan 1993 menunjukkan, luas lahan garapan per keluarga petani di Jawa telah mengalami penurunan dari 0,58 hektar menjadi 0,48 hektar¹. Luasan ini semakin hari semakin menurun. Hal ini juga dibuktikan pada pemaparan program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, Suswono sebagai Menteri Pertanian RI juga menyatakan bahwa rata-rata luas lahan pertanian yang dimiliki oleh petani hanyalah 0,3 hektar dengan luas ideal tanah garapan seluas 2 hektar per kepala keluarga². Dengan luasan sebesar itu, petani tidaklah mungkin dapat hidup sejahtera. Perlu dilaksanakan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah salah satunya ialah reforma agraria.

Kecilnya ukuran luas lahan yang dimiliki oleh petani tak lepas dari sejarah yang melatarbelakanginya. Pada jaman

penjajahan dahulu, ribuan hektar tanah petani diambil paksa oleh penjajah. Hal ini membuat rakyat Indonesia menderita kelaparan dan ketidakberdayaan. Hingga masa kemerdekaan pun, keadaan petani dan permasalahan tanah tidak membaik. Petani tetap dijadikan buruh di perkebunan-perkebunan besar dengan kehidupan yang jauh dari ambang sejahtera. Hanya segelintir orang saja yang merasa diuntungkan atas perkebunan tersebut.

Menurut Hafid (2001), persoalan tanah makin krusial akibat keluarnya UU Pokok Kehutanan (No.5/1967) dan UU Pokok Pertambangan (No. 7/1967) karena UU ini dianggap tidak sejalan dengan UUPA No.5/1960. Dengan adanya UU tersebut, hak dan kepentingan rakyat kecil menjadi semakin tergeser karena segala bentuk pembangunan yang dilakukan hanya untuk mengejar keuntungan pemodal besar. Protes petani untuk mendapatkan hak-haknya tidak didengar oleh pemerintah dan malah dianggap sebagai tindakan pidana dengan menentang kebijakan pembangunan nasional.

Menurut Mustain (2007), konflik pertanahan di perdesaan umumnya bersumber dari perebutan tanah antara perkebunan (baik negara maupun swasta) dengan rakyat petani. Perusahaan perkebunan milik negara tersebar diberbagai penjuru Nusantara, salah satunya terletak di Jawa Barat. Perusahaan ini berstatus sebagai sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perkebunan milik negara ini memiliki berbagai komoditi seperti kelapa sawit, teh, kakao, karet, kina, dan gutta percha. Namun komoditi terbesar yang dihasilkan perkebunan yang terletak di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sukabumi ini ialah teh dengan total produksi sekitar 61.072 ton per tahun. Jawa Barat menyumbang 60 persen dari produksi

¹ Diambil dari www.amline.edu/apakabar/basisdata/1997/09/17/0038.html

² Diambil dari <http://donnytobing.wordpress.com/2010/02/07/100-hari-pemerintahan-kib-jilid-ii/>

teh nasional³. Untuk kebun teh, perkebunan milik negara ini tersebar di beberapa unit kebun dengan total luas 25.981 hektar. Salah satunya ialah yang ada di Desa Cisarua, Kabupaten Sukabumi.

Masyarakat di sekitar perkebunan teh ini hidup bergantung kepada kegiatan perkebunan. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai buruh di perkebunan tersebut sebagai pemetik teh dan buruh tani. Masyarakat di daerah ini sangat sedikit yang bermatapencaharian sebagai petani yang bercocok tanam sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh lahan karena lahan di wilayah desa ini merupakan HGU untuk perkebunan milik negara. Selain itu, latar belakang masyarakat yang ada di daerah tersebut berasal dari daerah lain yang didatangkan khusus untuk menjadi buruh. Bekerja di perkebunan merupakan suatu tradisi turun temurun yang dilakukan masyarakat sekitar. Meski masyarakat telah bekerja secara turun temurun sejak puluhan tahun yang lalu, nasib masyarakat di daerah tersebut tidak banyak berubah.

Sejak jatuhnya rezim Soeharto, petani di Indonesia mulai berani melakukan aksi perjuangan. Perjuangan untuk mendapatkan tanah untuk petani bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan strategi yang tepat dalam memperjuangkan akses dan penguasaan atas tanah. Strategi yang diterapkan tidaklah sama di tiap lokasi. Strategi yang diterapkan haruslah disesuaikan dengan karakteristik sosial dan masalah yang dihadapi.

Pertanyaan Penelitian

Penyelesaian masalah agraria hingga saat ini hanya sampai pada taraf menenangkan keadaan dan menyelesaikan masalah-masalah kecil tanpa menyelesaikan permasalahan utama. Berdasarkan paparan di atas penting bahwasanya mengetahui strategi petani dalam upaya mendapatkan akses dan penguasaan lahan di Desa Cisarua dikaji secara lebih mendalam dengan berbagai perspektif sehingga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bentuk solusi dan rekomendasi bagi permasalahan agraria yang ada di Indonesia dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya petani. Hal ini disebabkan karena Petani sebagai pihak yang merasakan langsung dampak ketiadaan akses dan penguasaan tanah menjadi pihak yang paling dirugikan. Hal tersebut menjadi urgensi dari penelitian mengenai strategi petani dalam memperjuangkan akses dan penguasaan atas tanah. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskanlah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi petani di wilayah Desa Cisarua, Kabupaten Sukabumi yang berhubungan dengan akses dan penguasaan atas lahan?
2. Bagaimanakah strategi yang digunakan petani dalam memperjuangkan akses dan penguasaan atas lahan di wilayah Desa Cisarua, Kabupaten Sukabumi?
3. Apa sajakah faktor-faktor yang berhubungan dengan strategi petani dalam memperjuangkan akses dan

penguasaan atas lahan di wilayah Desa Cisarua, Kabupaten Sukabumi?

4. Sejauh mana tingkat keberhasilan strategi yang digunakan petani dalam memperjuangkan akses dan penguasaan atas lahan di wilayah Desa Cisarua, Kabupaten Sukabumi?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk:

1. Mengetahui permasalahan petani di Desa Cisarua yang berhubungan dengan akses dan penguasaan atas lahan.
2. Mengetahui bagaimana strategi perjuangan yang digunakan petani dalam memperjuangkan akses dan penguasaan atas lahan.
3. Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan strategi yang digunakan petani dalam memperjuangkan akses dan penguasaan atas lahan.
4. Mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan strategi yang digunakan petani dalam memperjuangkan akses dan penguasaan atas lahan.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat untuk mahasiswa selaku pengamat dan akademisi, masyarakat dan pemerintah. Adapun manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Bagi Mahasiswa, dapat menjadi contoh dan menambah wawasan mahasiswa mengenai masalah yang dihadapi petani dalam hal akses dan penguasaan atas lahan.
2. Bagi Masyarakat, dapat lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi petani karena ketiadaan akses dan penguasaan atas lahan serta strategi yang digunakan petani dalam memperjuangkan hak dan penguasaan atas lahan tersebut.
3. Bagi Perguruan Tinggi, dapat menjadi sumber rujukan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang gerakan sosial agraria khususnya mengenai strategi yang digunakan petani dalam memperjuangkan akses dan penguasaan atas lahan.
4. Bagi Pemerintah, dapat menjadi masukan, tambahan informasi, dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan strategi petani dalam memperjuangkan akses dan penguasaan atas lahan.

PENDEKATAN KONSEPTUAL

Tinjauan Pustaka

Latar Belakang Terjadinya Gerakan Perjuangan Petani

Peran negara yang semakin meluas dalam proses transformasi perdesaan menurut Scott (1993) mengakibatkan: (1) perubahan hubungan antara petani lapisan kaya dan lapisan miskin, (2) munculnya realitas kaum miskin untuk membentuk kesadaran melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk yang merupakan pembelotan kultural, dan (3) terbangunnya senjata gerakan perlawanan menghadapi kaum kaya maupun negara seperti menghambat, pura-pura menurut, pura-pura tidak tahu, perusakan, berlaku tidak jujur, mencopet,

³ Diambil dari www.kpbptpn.co.id/profileptpn pada tanggal 19 Juni 2010 pukul 17.40 wib

membuat skandal, membakar, memfitnah, sabotase, dan mengakhiri pertentangan secara kolektif.

McAdam *dkk* (2001) dalam Mustain (2007) menyatakan bahwa gerakan sosial terjadi pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan, transisional menuju perubahan sosial karena terbukanya kesempatan aktor untuk merespon, memobilisasi struktur-struktur sosial dan budaya yang ada sehingga memungkinkan dilakukannya komunikasi, koordinasi, dan komitmen di antara para aktor sehingga menghasilkan kesamaan pengertian dan memunculkan kesadaran bersama tentang apa yang sedang terjadi.

Scott (1981) menjelaskan mengenai alasan petani marah yang dikemukakan Barrington Moore disebabkan oleh pembebanan atau tuntutan baru yang secara tiba-tiba merugikan banyak orang sekaligus dan melanggar aturan serta adat istiadat yang diterima. Hal ini dapat membangkitkan solidaritas pemberontakan atau revolusi di setiap jenis masyarakat petani karena tidak ada satu pun tipe masyarakat petani yang kebal terhadap pemberontakan atau revolusi. Meskipun demikian, ada variasi dalam potensi eksplosif yang dapat dihubungkan dengan tipe-tipe masyarakat petani.

Para petani biasanya bersedia mengambil resiko dengan mengadakan konfrontasi langsung bila mereka menganggap ketidakadilan tidak lagi dapat ditoleransi, bila tuntutan akan kebutuhan mereka melonjak secara tiba-tiba, serta bila institusi lokal dan nasional dan kondisi kultural cenderung meminta mereka untuk menggunakan jubah kolektif (Ecstein, 1989 dalam Mustain, 2007). Gerakan menurut Landsberger (1973) dalam Mustain (2007) lebih banyak terjadi di desa karena sering mendapatkan dukungan dari petani dan petani merupakan korban modernisasi sehingga setiap gerakan selalu didukung petani. Di Meksiko, Eckstein (1989) dalam Mustain (2007) menunjukkan bahwa revolusi agraris ditentukan oleh ikatan-ikatan desa dan otonomi institusi-institusi lokal dan tak terlampaui menonjolkan dasar mobilitas perdesaan.

Popkin (1979) menyatakan bahwa gerakan perlawanan petani lebih karena faktor determinan individu, bukan kelompok. Setiap manusia ingin menjadi kaya. Biang keladi atas terjadinya perlawanan para petani tradisional datang dari penetrasi kapitalisme ke kawasan perdesaan yang dalam banyak kasus melahirkan eksploitasi terhadap para petani oleh para tuan tanah, oleh Negara dan kaum kapitalis. Gurr (1970) dalam Mustain (2007) juga memandang faktor frustrasi dan pengurangan hak relatif yang terjadi dalam masyarakat petani dengan pihak lain menjadi pendorong bagi petani melakukan perlawanan. Kornhouser (1959) dalam Mustain (2007) memandang faktor keterasingan dan anomoni yang dialami warga petani oleh karena mereka justru semakin miskin dan terpinggirkan.

Mustain (2007) mengutip Wolf (1969) menyatakan bahwa petani kelas menengah menjadi pelopor pendukung gerakan petani karena petani kelas menengah paling mudah terkena dampak penyitaan tanah, fluktuasi pasar, tingginya tingkat bunga, dan perubahan-perubahan lain yang diakibatkan pasar dunia. Hal ini tidak seperti petani

miskin dan buruh perkebunan karena mereka tidak memiliki basis ekonomi yang independen dan sumber daya politik taktis (Siahaan, 1996 dalam Mustain, 2007).

Popkin (1979) menyebutkan bahwa semua perlawanan petani tidaklah dimaksudkan untuk menentang program negara tapi lebih dimaksudkan untuk menentang kekuasaan elite desa (petani kaya) yang selama ini mengklaim komunitas tradisional, padahal lebih untuk mempertahankan tatanan demi keuntungan mereka. Penelitian Popkin di Vietnam menemukan bahwa: (1) gerakan yang dilakukan petani adalah gerakan antifeodal, bukan untuk mengembalikan tradisi lama tapi untuk membangun tradisi baru, (2) tidak ada kaitan yang signifikan antara ancaman terhadap subsisten dan tindakan kolektif, dan (3) kalkulasi keterlibatan dalam gerakan lebih penting daripada isu ancaman kelas.

Asumsi pendekatan ekonomi-politik menyatakan bahwa gerakan perlawanan petani sebenarnya didasari oleh pertimbangan rasional individual para petani terhadap perubahan yang dikalkulasikan akan merugikan dan bahkan mengancam mereka atau, sekurang-kurangnya, perubahan ini dinilai menghalang-halangi usaha yang telah mereka lakukan untuk meningkatkan taraf hidup dengan kata lain dapat dikatakan bahwa petani juga berorientasi ke masa depan (Mustain, 2007).

Pernyataan ahli lain seperti Race (1972) dalam Mustain (2007) menyatakan bahwa aksi perlawanan petani biasanya untuk memenuhi kepentingan materi dan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa petani akan melakukan aksi atau perlawanan berpatokan dengan adanya insentif selektif dan petani akan menghitung waktu partisipasi mereka menurut insentif yang tersedia. Didukung oleh Migdal (1974) dalam Mustain (2007), jika ada sejumlah insentif selektif, para petani akan membandingkan antara perolehan meteri dan resiko yang ditawarkan oleh organisasi swasta yang berbeda atau oleh negara.

Orang melakukan gerakan lebih banyak didasari oleh pilihan rasionalnya. Hal ini diperdalam oleh Salert (1976) dalam Mustain (2007) dengan menjelaskan alasan pilihan rasional itu relevan terhadap aksi revolusioner karena teori ini melibatkan sifat efek faktor psikologis yang diperlukan untuk menjelaskan partisipasi orang dalam aksi kolektif dan teori ini dapat difokuskan pada proses pembentukan putusan sebelum melakukan aksi kolektif yang kemudian akan membentuk pengalaman sosial yang akan mengakibatkan perubahan perilaku sebagian masyarakat.

Menurut Mustain (2007), latar belakang terjadinya konflik pertanahan di perdesaan umumnya bersumber dari perebutan tanah antara perkebunan dan petani. Seperti yang melatarbelakangi perjuangan petani di PTPN VII Kalibakar, yaitu: (a) kemarahan petani akan janji dikembalikannya tanah nenek moyangnya, (b) ketidakjelasan dan ketidaksesuaian penjelasan pihak PTPN XII dan BPN tentang luas lahan, (c) muncul dan meluasnya kesadaran “bersalah” karena tidak mampu mempertahankan tanah hasil perjuangan leluhurnya, (d) manajemen PTPN XII tidak akomodatif dan sensitif dengan tekanan tenaga kerja lokal, (e) kejanggalan data

HGU PTPN XII, dan (f) perilaku arogan dan *over acting* dari para sinder dan mandor perkebunan.

Menurut Hafid (2001), perjuangan petani di Jenggawah terjadi akibat akumulasi kekecewaan, ketertindasan, serta keterpurukan tenaga dan harga diri petani. Petani juga masih dicap sebagai PKI sehingga mereka mengalami penyiksaan dan diskriminasi dari pemerintah dan perkebunan.

Sitorus (2006) menyatakan bahwa perjuangan petani yang berada di daerah hutan dipicu oleh keluarnya klaim negara atas hutan tersebut. Seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah dimana hutan-hutan tersebut diklaim menjadi Taman Nasional. Dengan berubahnya status tanah hutan tersebut dari rezim terbuka menjadi akses tertutup, masyarakat yang bermukim di wilayah ini menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena mereka dilarang untuk melakukan berbagai macam kegiatan di dalam area Taman Nasional. Hal ini membuat masyarakat adat menjadi pihak yang terpinggirkan dan tidak diperhitungkan kepentingannya. Hal ini mendukung pendapat Wignjosobroto (2002) dalam Mustain (2007) bahwa terjadi benturan antara dua hukum, yaitu hukum negara dan hukum rakyat sehingga memunculkan *cultural conflict*.

Bachriadi dan Lucas (2001) menyatakan bahwa penderitaan yang dirasakan petani juga bisa berasal dari ambisi pejabat Negara. Aksi sepihak yang dilakukan pejabat dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Tapos, dimana Presiden ingin memiliki area untuk tempat bertani dan beristirahat. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, presiden melakukan penggusuran terhadap ratusan keluarga petani penggarap pada tahun 1971. Di Cimacan, penggusuran terhadap ratusan keluarga petani karena akan dibangunnya lapangan Golf dan sarana pariwisata.

Model Gerakan Strategi Perjuangan Petani

Teori Moral Ekonomi Scottian dipelopori oleh James C. Scott (1981) memandang model gerakan perlawanan kaum petani sebagai model perlawanan “Gaya Asia” dimana gerakan petani miskin yang lemah dengan organisasi yang anonim, bersifat nonformal melalui koordinasi asal sama tahu saja, dengan bentuk perlawanan kecil dan sembunyi-sembunyi yang dilakukan setiap hari dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian, mencuri, memperlambat kerja, berpura-pura sakit dan bodoh, mengumpat dan sejenisnya. Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik petani yang lemah karena tidak membutuhkan koordinasi atau perencanaan. Dalam penelitian ini teori Scott hanya digunakan sebagai rujukan pola perjuangan petani, bukanlah sebagai rujukan mengenai latar belakang perjuangan petani yang mempertimbangkan keharmonisan serta moral kebersamaan.

Scott (1993) menjelaskan perbedaan antara perlawanan “sungguh-sungguh” dengan perlawanan yang bersifat “insidental”. Perlawanan “insidental” ditandai oleh: (a) tidak terorganisasi, tidak sistematis, dan individual, (b) bersifat untung-untungan dan pamrih, (c) tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan (d) dalam maksud dan logika mengandung arti penyesuaian dengan

sistem dominan yang ada. Sebaliknya perlawanan “sungguh-sungguh” ditandai dengan: (a) lebih terorganisasi, sistematis, dan kooperatif, (b) berprinsip atau tanpa pamrih, (c) mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan (d) mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi. Scott juga mengatakan bahwa apapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani dapat dilihat sebagai perlawanan seperti aksi mencuri hasil panen jika hal tersebut sesuai dengan tujuan definisi perlawanan. Perlawanan petani juga tidak harus dalam bentuk aksi bersama.

Ecstein (1989) dalam Mustain (2007) menyatakan, meskipun petani tampaknya pasif, sungkan, dan diam, mereka dapat saja menolak kondisi yang tidak mereka sukai melalui cara mengurangi produksi, atau tidak mengindahkan informasi-informasi penting dari para penindasannya. Bentuk perlawanan secara diam-diam atau terselubung lebih umum dilakukan daripada melawan secara terang-terangan.

Untuk mencapai tujuan, petani perlu menyusun strategi gerakan yang tepat. Terdapat dua bentuk strategi umum yang dapat dilakukan oleh petani, yaitu: (1) melalui jalur hukum dan (2) aksi massa secara langsung oleh petani. Aksi massa menurut Aji (2005), dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: (1) reklamasi; (2) ekspansi anggota baru; (3) dukungan terhadap organisasi tani lokal; dan (4) aksi demonstrasi.

Dalam Mustain (2007) dipaparkan bahwa bentuk strategi yang dilakukan petani melalui aksi massa dan spontan dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Desa Simojayan, dimana petani melakukan pembabatan terhadap tanaman kakao yang berada di dalam wilayah PTPN VII. Petani melakukan aksi pembabatan selama tiga hari dengan hasil pembabatan seluas 250 hektar tanah perkebunan. Kasus gerakan petani di Desa Tirtoyudo bersifat terencana dengan bentuk strategi yang dilakukan ialah melalui jalur hukum dan aksi massa. Gerakan petani bersifat terencana karena petani melakukan berbagai persiapan seperti pertemuan dan rapat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk aksi klaim secara langsung dilakukan oleh petani disebabkan oleh bentuk strategi pertama yaitu melalui jalur hukum tidak ditanggapi oleh instansi terkait.

Kasus yang terjadi di Jenggawah menurut Hafid (2001), juga masuk dalam kategori bentuk strategi yang bersifat terencana dengan menggunakan strategi hukum dan aksi langsung. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan yang dilakukan para tokoh untuk menyatukan visi, misi, dan persepsi. Para tokoh juga melakukan diskusi tentang kelemahan dari HGU PTPN X. Strategi melalui jalur hukum dilakukan dengan mengirim surat dan melakukan berbagai pertemuan dengan pejabat dan instansi terkait.

Menurut Sitorus (2006), berdasarkan moda gerakan reklamasi tanah, tipologi reforma agraria dibagi menjadi tiga yaitu: (1) aneksasi, (2) integrasi, dan (3) kultivasi. Pembagian tipologi reforma agraria dari bawah ini merujuk pada cara mendapatkan akses terhadap tanah. Tipe aneksasi dimana masyarakat secara langsung menempati kawasan hutan negara secara paksa dan ilegal untuk kegiatan pertanian. Tipe aneksasi dapat dilihat dalam kasus di Dongi-dongi dimana masyarakat secara

langsung menempati kawasan hutan negara secara paksa dan ilegal untuk kegiatan pertanian. Tipe kedua ialah tipe integrasi dimana gerakan yang dilakukan masyarakat mengkolaborasi negara dan komunitas lokal dalam manajemen sumberdaya hutan seperti yang terjadi di Toro. Tipe yang ketiga ialah tipe kultivasi, menggabungkan kedua tipe aneksasi dan integrasi. Pada satu sisi, tanah direklamasi dan secara faktual ditanami atau diusahakan oleh penduduk tapi di sisi lain tanah juga masih diklaim dan juga secara faktual dikelola sebagai bagian dari taman nasional seperti di Sintuwu dimana penduduk merambah kawasan hutan negara dan melakukan aksi unjuk rasa untuk memperjuangkan hak mereka.

Shohibuddin (2007) menjelaskan bahwa masyarakat Toro melakukan empat agenda strategis, yaitu: (1) tahap pembentukan landasan; (2) tahap perjuangan untuk memperoleh pengakuan; (3) tahap konsolidasi lebih lanjut; (4) tahap diseminasi keluar.

Faktor yang Mempengaruhi Strategi Perjuangan Petani

Faktor Internal

Untuk mencapai tujuan petani biasanya menggunakan penggalangan massa karena semakin besarnya jumlah massa yang ikut maka akan semakin didengar suara mereka. Namun menurut Wolf (1966) dalam Mustain (2007) terdapat beberapa faktor yang membuat gerakan petani sulit untuk mendapatkan massa yaitu: (1) kurang adanya kerjasama antar sesama petani dalam mengelola tanah, (2) terjebak dalam rutinitas irama pekerjaan sektor pertanian, (3) lebih berorientasi ke jenis tanaman lokal dari pada komersial, (4) terbuai dengan sifat komunalitas kekerabatan sehingga rentan terhadap perubahan, (5) tidak mempunyai orientasi kepentingan yang jelas, (6) orientasi ke "in-group" lebih kuat sehingga kurang tertarik terhadap pengetahuan dari luar yang mestinya dibutuhkan untuk mengungkapkan kepentingannya. Sikap petani seperti itu dikarenakan para petani lebih mengedepankan semangat komunalisme dengan mengedepankan nilai-nilai pemerataan terhadap sumber-sumber yang kian terbatas (Scott, 1981). Scott (1993) juga mengungkapkan rintangan petani untuk melakukan perlawanan kolektif yaitu: (1) rumitnya struktur kelas setempat sehingga menghalangi pendapat kolektif, (2) rasa takut terhadap pembalasan atau penahanan sehingga petani lebih memilih bersikap rendah hati, dan (3) "tekanan setiap hari" dimana tidak ada kemungkinan yang realistis untuk secara langsung atau kolektif menata kembali keadaannya sehingga si miskin tidak ada pilihan lain kecuali menyesuaikan diri.

Petani tidak mau ikut gerakan perlawanan meski sedang berada dalam krisis subsistensi jangka pendek yang diakibatkan oleh perubahan yang dihasilkan oleh penetrasi kapitalis karena tidak tercapainya kesepakatan antar petani dalam melakukan aksi bersama, juga adanya penilaian bahwa cara-cara perlawanan dianggap tidak akan bisa menyelesaikan masalah, masih ada cara lain yang dinilai lebih baik seperti kompromi yang diperhitungkan lebih menguntungkan (Popkin, 1979).

Untuk melakukan perlawanan atau tindakan kolektif yang terorganisasi, petani harus memiliki pengaruh internal yang menurut Skocpol (1991) dalam Mustain (2007) pengaruh internal dipengaruhi oleh: (1) jenis solidaritas petani, (2) kemampuan membebaskan diri dari kontrol sehari-hari tuan tanah dan kaki tangannya, (3) pendorongan sanksi-sanksi kerja paksa dari Negara terhadap pemberontakan petani. Pengaruh internal yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan kolektif yang terorganisasi terhadap orang-orang yang memeras mereka.

Ada dua tipe organisasi petani dalam melakukan perlawanan, yaitu: (1) organisasi yang muncul dari dalam kelompok petani sendiri untuk mengatur dirinya sendiri, dan (2) organisasi yang muncul dari luar. Keberhasilan organisasi yang mengorganisasi dirinya sendiri berdasarkan ketidaksepakatan bersama dan organisasi yang muncul dari luar keberhasilannya memerlukan mekanisme dengan melaksanakan peraturan tertentu seperti kemampuan dalam mengundang para pengikutnya untuk berpartisipasi secara aktif (Lichbach, 1994 dalam Mustain, 2007).

Menurut Mustain (2007), untuk memperjuangkan tanah petani mengalami berbagai problematika internal seperti timbulnya sikap saling curiga antar sesama petani yang kemudian mempengaruhi soliditas gerakan petani, munculnya kesenjangan sosial, golongan kaum borjuis, hingga problematika masa depan pertanian yang makin tergeser akibat adanya pergeseran beberapa sektor pembangunan yang menjadi tumpuan penggerak utama ekonomi nasional. Pada awalnya pembangunan bertumpu pada sektor pertanian, kemudian kini bertumpu pada sektor industri dan jasa karena dianggap mempunyai nilai tambah untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Pangestu (1995) dalam Febriana (2008) menjelaskan bahwa faktor-faktor internal yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam suatu program ialah hal yang mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu tersebut mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah dan pengalaman berkelompok.

Silaen (1998) dalam Wicaksono (2010) menyatakan bahwa semakin tua umur seseorang maka penerimaannya terhadap hal-hal baru semakin rendah. Hal ini karena orang yang masuk dalam golongan tua cenderung selalu bertahan dengan nilai-nilai lama sehingga diperkirakan sulit menerima hal-hal yang sifatnya baru. Tamarli (1994) dalam Febriana (2008) juga menyatakan bahwa umur merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi. Semakin tua seseorang, relatif berkurang kemampuan fisiknya dan keadaan tersebut mempengaruhi partisipasi sosialnya. Oleh karena itu, semakin muda umur seseorang, semakin tinggi tingkat partisipasinya dalam suatu kegiatan atau program tertentu.

Ajiswarman (1996) dalam Wicaksono (2010) menyatakan tingkat pendidikan mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap sesuatu hal yang baru. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah baginya untuk menerima hal-hal baru yang ada di sekitarnya.

Jumlah beban tanggungan juga dinyatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi. Seperti yang diungkapkan Ajiswarman (1996) dalam Febriana (2008), semakin besar jumlah beban keluarga menyebabkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan akan berkurang karena sebagian besar waktunya digunakan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Nurlela (2004) dalam Wicaksono (2010) mengungkapkan bahwa tingkat pendapatan seseorang tidak mempengaruhi partisipasi orang dalam suatu kegiatan.

Faktor Eksternal

Dalam Mustain (2007) dijelaskan mengenai proses memobilisasi suatu gerakan perlawanan dipengaruhi oleh seorang aktor yang berpeluang mendayagunakan sejumlah potensi nilai-nilai lokal. Hal ini juga didukung oleh Ecskein (1989) dalam Mustain (2007) bahwa penting untuk memerhatikan faktor kekuatan dan tekanan Negara. Tilly (1978) dan Wolf (1969) dalam Mustain (2007) juga mengatakan bahwa pemberontakan tidak akan terjadi jika situasinya benar-benar tidak mendukung. Hal ini didukung dengan pernyataan Arif, 2002; Anshori, 2003; Wignjosoebroto, 2002 dalam Mustain, 2007 bahwa yang mempengaruhi strategi perjuangan petani ialah persoalan hukum dalam penataan tanah yang hingga era reformasi masih problematik.

Pemerintah, swasta, dan kelompok lain yang memberontak dapat memberikan insentif selektif dan berhak bergabung dengan gerakan wilayah tertentu daripada organisasi lain berdasarkan tersedianya intensif selektif. Negara mempengaruhi tingkat insentif selektif dalam perbedaan kolektif dengan cara tertentu. Cara yang optimal untuk menawarkan insentif selektif adalah dengan menjadi supplier tunggal atau monopoli. Organisasi petani yang mempunyai akses khusus untuk mendapatkan insentif selektif terbukti lebih berhasil memobilisasi pengikutnya dibandingkan dengan kelompok yang tidak mempunyai akses. Organisasi yang memberontak jika tidak mampu memasuki perang tawar-menawar perlu menjauhi rezim. Hal ini disebabkan rezim dapat mengalahkan dengan mudah organisasi tersebut (Mustain, 2007). Ditambahkan bahwa pemberian insentif selektif tanpa faktor lain tidak akan pernah cukup untuk mendukung suatu pemberontakan petani dan barang kebutuhan umum tanpa didukung oleh hal lain juga tidak akan pernah cukup untuk memulai suatu pemberontakan petani.

Adapun cara *entrepreneur* menemukan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyediakan insentif selektif bagi para pengikutnya dijelaskan dalam Mustain (2007) diambil dari berbagai ahli ialah: (1) mendorong pengikutnya untuk melakukan penjarahan (Avrich, 1972), (2) mendistribusikan ulang sumber daya (Popkin, 1979), (3) pemimpin yang memberontak merahasiakan kebaikan, persolaan, ataupun keluhan yang dapat menarik kelompoknya, (4) pemimpin yang memberontak dapat mematahkan monopoli kaum elite pada institusi politik dan mungkin saja menciptakan organisasi desa petani baru, (5) pemberontak mencari penyokong yang dapat menyediakan insentif selektif, dan (6) intensif selektif selalu tersedia dalam jumlah sedikit dan selalu diharapkan oleh petani yang lebih miskin.

Pangestu (1995) dalam Febriana (2008) memaparkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu, bila didukung dengan pelayanan pengelolaan kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tidak akan ragu-ragu untuk berpartisipasi.

Eisinger (1973) dalam McAdam dan Snow (1997) mengungkapkan bahwa kesempatan politik menjadi salah satu pokok terjadinya gerakan sosial dan terjadinya protes berhubungan dengan lingkungan dari kesempatan politik yang ada disuatu kota. Eisinger juga mendefinisikan bahwa kesempatan politik merupakan derajat dimana suatu kelompok dapat meningkatkan akses terhadap kekuasaan dan dapat memanipulasi sistem politik. Hal ini didukung dengan pernyataan Moniaga (2010) bahwa pada era reformasi, kaum terpinggirkan bebas untuk berpolitik seperti masyarakat kasepuhan yang secara tegas memutuskan untuk bertindak mengatasi kemelut pertanahan yang mereka hadapi.

Tingkat Keberhasilan Perjuangan Petani

Banyak kasus mengenai masalah pertanahan di Indonesia yang masih terus berlanjut hingga kini meski pun lahan tersebut telah diduduki oleh masyarakat namun lahan tersebut belum ada pengakuan secara hukum. Menurut Mustain (2007), hal ini disebabkan karena belum habisnya HGU seperti yang terjadi di Kalibakar, Malang. Meski pun petani berhasil membabat dan menduduki lahan tersebut, namun petani belum mendapatkan kepastian hukum. Hal ini karena masih terbentur masalah HGU yang berlaku hingga tahun 2014 dan belum adanya kepastian bahwa tanah tersebut akan dikembalikan kepada rakyat ketika HGU tersebut habis. Karena lelah, petani bersikap defensif dan reaktif. Defensif dalam artian menunggu sampai habisnya masa HGU PTPTN XII.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Bachriadi dan Lucas (2001), dimana kasus di Tapos juga belum menemukan titik terang. Meski Kepala Kantor BPN Bogor telah menyatakan sekitar 450 hektar lahan peternakan Tri-S Tapos akan dikembalikan kepada petani penggarap, sisanya diserahkan kepada Pemda Kabupaten Bogor. Di Bengkulu juga terjadi kasus yang sama menurut Serikat Tani Bengkulu (2006), dimana meskipun masyarakat telah dapat mengakses lahan dan telah melakukan mobilisasi terhadap penduduk miskin dari desa lain namun belum mendapatkan pengakuan secara hukum. Hal ini membuat lahan tersebut dapat di klaim sewaktu-waktu oleh pihak perkebunan yang memegang HGU. Untuk mengantisipasi diambilnya kembali lahan tersebut, petani membayar pajak dan menabung untuk persiapan sertifikasi tanah.

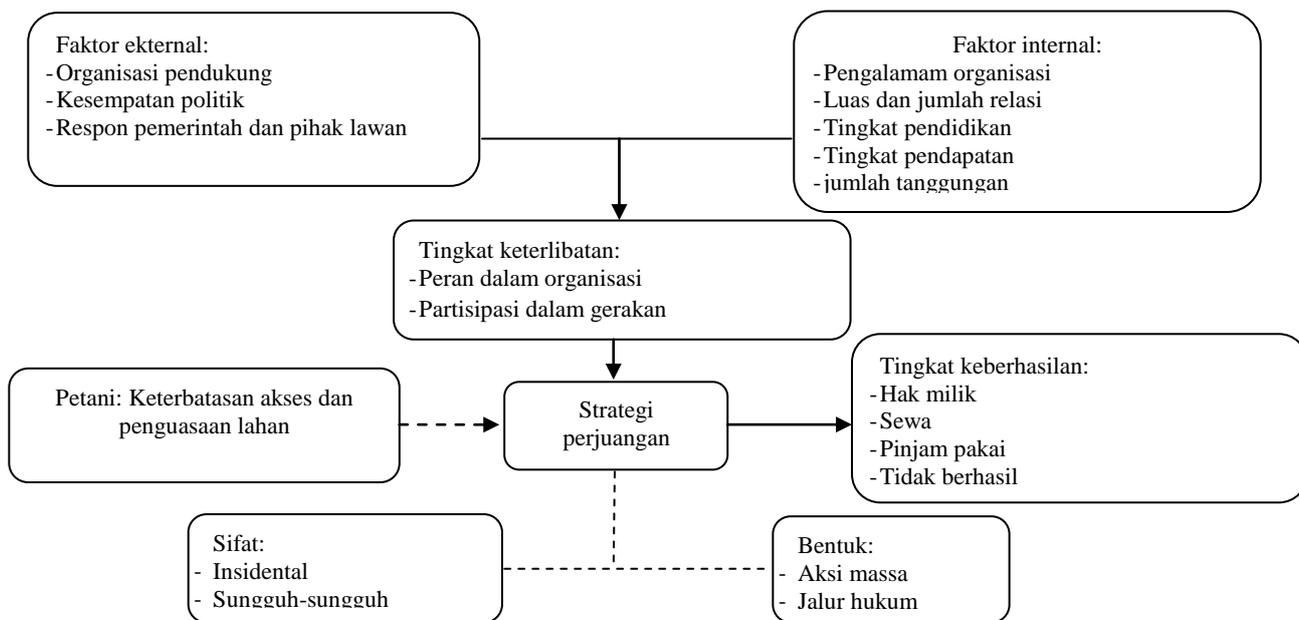
Keberhasilan yang dicapai oleh masyarakat dataran tinggi yang tinggal di wilayah hutan lindung juga berbeda-beda. Di Dongi-dongi, Sulawesi Tengah telah terjadi konversi lahan besar-besaran yang diakibatkan adanya gerakan petani atau tindakan kolektif penduduk yang paksa dan ilegal membuka, bercocok tanam, dan sekaligus

bermukim di sebidang tanah hutan negara. Di Toro, hasil yang dicapai cukup unik, dimana hak adat kembali diakui oleh negara. Hal ini terjadi akibat terjadinya perambahan hutan oleh masyarakat karena kekurangan tenaga dalam mengontrol dan menegakkan hukum pada masyarakat lokal, sehingga terciptanya resolusi konflik dimana masalah-masalah hutan di Toro secara eksklusif ditangani oleh lembaga adat (Sitorus, 2006).

Masyarakat sebagian besar menginginkan tanah yang mereka peroleh mendapatkan sertifikat yang sah secara hukum untuk individu. Namun yang terjadi di Pasir Randu agak berbeda dimana petani menginginkan sertifikasi yang ditujukan pada organisasi atau Organisasi Tani Lokal agar perempuan yang secara aktif dalam proses *reclaiming* memiliki hak yang sama dalam penguasaan tanah (Bahari dan Krishnayanti, 2005). Kasus tanah adat masyarakat kasepuhan Citorek, Cibedug, dan Cisih juga belum memiliki kejelasan hukum, berbeda dengan masyarakat adat Baduy yang telah memiliki legal hukum yang tertuang dalam Perda No. 32 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Masyarakat kasepuhan Citorek, Cibedug, dan Cisih belum mendapatkan pengakuan formal secara hukum disebabkan oleh rumitnya kasus dan mengakui keabsahan klaim-klaim mereka atas tanah adat di Citorek dan Cibedug. Karena belum dapat dipastikan jenis hak atas tanah yang sesuai dengan konsep *wewengkon* dan diperlukan informasi rinci mengenai status tanah terkini. Lagi pula tanah itu secara legal berada dalam kawasan hutan negara dan tidak berwenang membatalkan secara sepihak (Moniaga, 2010). Contoh kasus tanah adat lain yang berhasil diselesaikan ialah di Kabupaten Nunukan, dimana telah keluar sebuah Perda No. 3 dan 4 tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Sebaliknya di Paser, status tanah ulayat telah dihapus karena masyarakat di daerah tersebut tidak lagi menggunakan

Cisarua, Kabupaten Sukabumi dimana penelitian ini dilakukan. Keadaan petani tersebut memicu terciptanya strategi petani. Strategi yang tepat diperlukan untuk mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan. Strategi perjuangan yang digunakan diduga memiliki hubungan dengan tingkat keterlibatan petani yang dilihat dari peran petani dalam organisasi dan partisipasi yang diberikan petani terhadap gerakan yang dilakukan untuk mendapatkan tanah. Tingkat keterlibatan petani di sini diduga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang datangnya dari dalam pribadi petani yang dibagi menjadi pengalaman berorganisasi, luas dan jumlah relasi, lama pendidikan yang telah dilalui, pendapatan, serta jumlah tanggungan. Faktor eksternal ialah hal-hal yang ikut berpengaruh namun berasal dari luar pribadi petani tersebut. Faktor eksternal dibedakan menjadi organisasi pendukung, kesempatan politik, serta respon pemerintah dan pihak lawan. Adapun sifat strategi perjuangan petani dibedakan menjadi "insidental" dan "sungguh-sungguh" dengan bentuk berupa aksi massa dan jalur hukum.

Bentuk aksi massa petani dibedakan menjadi demo, reklamasi, ekspansi anggota, dukungan terhadap organisasi tani lokal, serta perlawanan kecil dan sembunyi-sembunyi yang dilakukan setiap hari dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian, seperti mencuri, memperlambat kerja, berpura-pura sakit dan bodoh, mengumpat dan sejenisnya. Strategi perjuangan yang digunakan petani kemudian akan berhubungan dengan tingkat keberhasilan dalam mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan. Tingkat keberhasilan yang dapat dicapai petani dalam mendapatkan akses dan penguasaan atas tanah ialah hak milik, sewa, pinjam pakai, serta tidak berhasil mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan. Untuk lebih jelas, kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian
Keterangan: —————> Berhubungan
- - - - -> Komponen
- - - - -> Memicu

sistem hak ulayat (Bakker, 2010).

Kerangka Pemikiran Penelitian

Keterbatasan akses dan penguasaan lahan menjadi masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh petani di Indonesia khususnya di wilayah perkebunan di Desa

Hipotesis Penelitian

Hipotesis Uji

Penyusunan hipotesis bertujuan untuk memudahkan peneliti menjawab permasalahan dan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari penelitian yang telah dirumuskan. Dari kerangka pemikiran di atas dapat disusun hipotesis uji berupa:

1. Tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan tingkat keterlibatan petani dalam perjuangan untuk mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan.
2. Luas dan banyaknya jumlah relasi berkorelasi positif dengan tingkat keterlibatan petani dalam perjuangan untuk mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan.
3. Tingkat pendapatan berkorelasi positif dengan tingkat keterlibatan petani dalam perjuangan untuk mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan.
4. Pengalaman dan peran dalam organisasi berkorelasi positif dengan tingkat keterlibatan petani dalam perjuangan untuk mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan.
5. Jumlah tanggungan keluarga berkorelasi negatif dengan tingkat keterlibatan petani dalam perjuangan untuk mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan.

Hipotesis Pengarah

Dari kerangka pemikiran di atas maka dapat disusun hipotesis pengarah dimana terdapat hubungan antara faktor eksternal petani yang berupa keterlibatan organisasi pendukung, kesempatan politik yang tersedia, serta respon pemerintah desa dan respon pihak perkebunan dengan tingkat keterlibatan petani dalam strategi memperjuangkan akses dan penguasaan atas lahan yang kemudian juga akan berhubungan dengan bentuk strategi yang digunakan petani dan tingkat keberhasilan petani dalam mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai strategi perjuangan petani dalam mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan dilaksanakan di Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Desa ini merupakan salah satu desa yang di dalamnya berada di dalam wilayah salah satu perkebunan milik negara dan berdekatan dengan hutan lindung. Hal ini menyebabkan petani mengalami keterbatasan akses dan penguasaan atas lahan karena lahan terkonsentrasi pada perkebunan dan hutan lindung. Pengumpulan data sekunder penelitian dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2010. Data primer penelitian telah dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan, dimulai dari bulan Oktober 2010 hingga Januari 2011.

Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai strategi perjuangan petani dalam mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan dilakukan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan explanatif dimana dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat

keberhasilan petani dalam mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan sesuai dengan strategi yang digunakan serta menggambarkan bagaimana proses yang dilalui petani untuk mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan. Metode kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan dan responden. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara faktor internal petani dengan tingkat keterlibatan petani dalam upaya untuk mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan. Metode kuantitatif dilakukan menggunakan metode survei yang mana pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner.

Teknik Pemilihan Responden dan Informan

Pemilihan responden dalam penelitian ini menggunakan metode *accidental sample (convenience sampling)* dengan populasi penelitian yaitu petani Desa Cisarua yang menggarap di lahan milik perkebunan blok 14, blok 15, dan blok 16 serta bertempat tinggal di RW 2, RW 3, dan RW 4 dengan total 760 KK. Responden dalam penelitian ini adalah petani kecil dan petani besar yang menggarap di lahan HGU milik perkebunan dengan jumlah responden sebanyak 34 orang. Petani besar hanya berjumlah 3 orang saja dan sisanya merupakan petani kecil. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil petani yang ditemui baik ketika berada di lahan perkebunan yang digarap oleh petani dan wilayah RW 2, RW 3, dan RW 4 untuk dijadikan responden. Informan terdiri dari aparatur desa, pegawai perkebunan, dan aktor dalam perjuangan petani dalam mendapatkan akses atas lahan. Hal ini dilakukan agar data dan informasi yang didapat akurat.

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam meneliti strategi perjuangan petani untuk mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan ialah metode triangulasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan kombinasi data yang akurat. Dalam metode ini, data didapatkan melalui wawancara mendalam, studi literatur, dan observasi lapang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur dari data di Kantor Desa Cisarua ialah data mengenai kondisi wilayah desa dilihat dari segi geografis, demografis, profil desa, serta infrastruktur desa. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian dimana dilakukan wawancara kepada responden dan informan yang mengacu kepada kuesioner dan panduan pertanyaan. Hasil wawancara mendalam kemudian direkam peneliti dalam catatan harian lapangan.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data mengenai strategi yang digunakan dalam perjuangan untuk mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan, kondisi geografis desa, demografis, profil desa serta infrastruktur dipaparkan secara deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan elite desa, tokoh masyarakat, responden, informan, dan observasi langsung disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis uji Korelasi *Rank Spearman* dilakukan untuk melihat hubungan antara tingkat pendidikan, pendapatan, jumlah tanggungan, pengalaman dan peran dalam

organisasi, serta jumlah dan luas relasi dengan tingkat keterlibatan petani dalam memperjuangkan akses dan penguasaan atas lahan. Pengolahan data ini dilakukan menggunakan program komputer Ms. Excel 2007 dan SPSS 17 for windows.

GAMBARAN UMUM LOKASI

Letak Geografis dan Keadaan Lingkungan

Desa Cisarua adalah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar ± 767,448 hektar dan terletak di lereng gunung Gede Pangrango. Secara geografis, Desa Cisarua dibatasi oleh Taman Nasional Gunung Pangrango di sebelah utara, Desa Limbangan di sebelah selatan, Desa Sukamekar di sebelah barat, dan Desa Langensari di sebelah timurnya.

Berdasarkan kegunaannya, tanah yang ada di desa ini terbagi menjadi tanah kering, tanah sawah, tanah perkebunan, tanah hutan dan untuk fasilitas umum. Luas penggunaan lahan di desa ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Tanah Berdasarkan Kegunaan di Desa Cisarua Tahun 2008

No	Kegunaan	Luas (Ha)
1.	Tanah sawah irigasi perdesaan	25,00
2.	Tanah kering	
	• Tegal/ladang	310,89
	• Pemukiman	15,75
	• Pekarangan	22,25
3.	Tanah perkebunan	
	• tanah perkebunan rakyat	20,00
	• tanah perkebunan negara	82,03
4.	Tanah hutan lindung	247,32
5.	Tanah fasilitas umum	44,21
Jumlah		685,42

Sumber: Profil Desa Cisarua, Kabupaten Sukabumi Tahun 2008

Bentangan wilayah Desa Cisarua terbagi menjadi wilayah berbukit, dataran tinggi, dan lereng gunung. Tingkat erosi di wilayah desa ini juga masih rendah. Berdasarkan data profil Desa Cisarua hanya 0,65 persen dari total luas wilayah yang berstatus erosi berat. Desa Cisarua terletak 900-1.200 m di atas permukaan laut sehingga menyebabkan iklim di Desa Cisarua termasuk basah dengan jumlah bulan hujan 9 bulan dan curah hujan sebesar 2.200 mm.

Desa Cisarua merupakan salah satu desa di Kabupaten Sukabumi, namun letaknya dekat dengan Ibukota Kota Sukabumi. Akses untuk menuju ke kota Sukabumi juga sangat mudah. Terdapat 80 angkutan umum yang tersedia selama 24 jam.

Demografi Desa

Penduduk Desa Cisarua sebagian besar merupakan etnis Sunda. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang datangnya penduduk di desa tersebut. Penduduk Desa Cisarua pada mulanya merupakan pekerja perkebunan yang khusus didatangkan dari Garut pada tahun 1928. Mereka didatangkan dari Garut untuk menjadi buruh di perkebunan. Hingga saat ini mereka secara turun menurun

terus menetap dan berkembang di Desa Cisarua. Berdasarkan profil Desa Cisarua pada tahun 2008, total jumlah penduduk Desa Cisarua berdasarkan jenis kelamin dapat dibedakan menjadi laki-laki sebanyak 3.563 orang dan perempuan sebanyak 3.431 orang.

Desa Cisarua memiliki 8 RW dan 30 RT dengan 1.798 Kepala Keluarga dengan kepadatan penduduk sebesar 911 jiwa per km². Desa Cisarua memiliki total jumlah penduduk sebanyak 6.994 orang dan 41,8 persen dari total jumlah penduduk hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SD/ sederajat, lalu diikuti oleh SMA, SMP, D3, D1, S1, dan D2. Penduduk di Desa Cisarua ini pun mayoritas beragama islam dan hanya 0,1 persen dari total jumlah penduduk yang beragama kristen.

Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk laki-laki di Desa Cisarua sebagian besar bermatapencaharian pokok sebagai buruh tani, karyawan perkebunan, petani, dan pedagang keliling. Penduduk perempuan, selain menjadi buruh tani dan karyawan perkebunan, banyak pula yang menjadi pembantu rumah tangga, pedagang keliling, dan petani. Berdasarkan profil Desa Cisarua juga diketahui komoditi pertanian yang mayoritas dibudidayakan di Desa Cisarua ialah tomat, sawi, kubis, dan cabe. Pada sektor perkebunan diketahui bahwa terdapat 5 keluarga yang memiliki tanah perkebunan dengan luasan kurang dari 10 hektar.

Penguasaan lahan di Desa Cisarua masih sangat minim, berdasarkan daftar isian tingkat perkembangan Desa Cisarua tahun 2008, dari 3.596 orang yang telah berkeluarga, hanya 1.283 orang yang memiliki aset tanah. Petani di Desa Cisarua seluruhnya menggarap di lahan milik perkebunan. Hal ini disebabkan karena letak Desa Cisarua yang berada di sekitar wilayah perkebunan milik negara dan hutan lindung.

Berdasarkan profil Desa Cisarua tahun 2008, didapat bahwa 88,77 persen petani di Desa Cisarua hanya menggarap 0,1-0,3 hektar lahan. Petani tersebut masuk dalam kategori petani kecil. Petani sedang merupakan petani yang menggarap lahan dengan luas 0,31-1,00 hektar. Petani yang masuk kategori sedang ada sekitar 9,19 persen dan hanya ada 2,04 persen petani yang masuk dalam kategori petani besar karena menggarap lahan dengan luasan lebih dari 1,1 hektar. Jumlah dan jenis mata pencaharian pokok penduduk di desa ini disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah dan Jenis Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Cisarua Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2008

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1.	Petani	189	48
2.	Buruh tani	702	302
3.	Pedagang keliling	151	65
4.	Karyawan perkebunan	457	197
5.	Pegawai negeri sipil	14	10
6.	Pengrajin industri rumah tangga	4	2
7.	Pembantu rumah tangga	0	72

8.	Guru swasta	6	2
9.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	10	2
10.	Peternak	42	0
11.	TNI	4	0
12.	Montir	4	0
13.	Dukun kampung terlatih	0	5
14.	Pengusaha kecil dan menengah	4	0
Jumlah		1.587	705

Sumber: Profil Desa Cisarua, Kabupaten Sukabumi Tahun 2008

Pemasaran hasil pertanian di Desa Cisarua ada yang dijual melalui tengkulak, pengecer, serta langsung dijual ke pasar. Pemasaran hasil perkebunan hanya dilakukan oleh tengkulak. Komoditi perkebunan yang dihasilkan di Desa Cisarua ialah teh.

Sarana dan Prasarana

Desa Cisarua merupakan desa kabupaten yang lokasinya berdekatan dengan kotamadya. Untuk mencapai desa ini terdapat 80 angkutan umum yang siap melayani selama 24 jam dan terdapat 60 ojek yang menghubungkan antar RW. Jalan-jalan di desa ini keadaannya berlubang dan becek. Hal ini dibuktikan melalui data desa bahwa hanya terdapat 3,6 km jalan dengan kondisi yang baik yang merupakan jalan kabupaten. Jalan desa dan jalan antar desa kondisinya rusak sepanjang 9,5 km dengan klasifikasi jalan makadam sepanjang 9 km dan jalan tanah sepanjang 0,5 km. Kondisi jalan yang rusak ini disebabkan oleh banyaknya truk pengangkut hasil perkebunan yang melewati jalan tersebut. Kondisi cuaca dengan curah hujan yang tinggi sehingga membuat kondisi jalan menjadi rentan rusak.

Desa Cisarua memiliki sarana peribadatan 12 mesjid dan 87 musholla yang tersebar di 8 RW dan 30 RT. Untuk prasarana kesehatan, Desa Cisarua memiliki puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan 8 posyandu yang tersebar di 8 RW. Sarana kesehatan yang dimiliki Desa Cisarua ialah 4 orang dukun bersalin terlatih. Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Cisarua hanya tersedia hingga jenjang SD. Di desa ini terdapat 2 buah Sekolah Dasar Negeri, 2 buah Taman Kanak-kanak, serta 4 buah Pendidikan Anak Usia Dini. Tidak terdapat Sekolah Menengah Pertama di desa ini.

Sejarah Desa Cisarua

Tahun 1920 Belanda membuka hutan untuk dijadikan perkebunan teh. Lalu pada tahun 1928 pabrik teh dibangun dan bibit teh didatangkan dari India. Untuk mengoperasikan perkebunan, dibutuhkan tenaga kerja. Untuk itulah pihak perkebunan mendatangkan buruh dari Garut menggunakan sistem bedol desa. Pada saat itu, Desa Cisarua masih merupakan bagian dari Desa Limbangan. Penduduk yang didatangkan tersebut lalu menetap dan terus berkembang hingga saat ini dan merasa merupakan penduduk asli Desa Cisarua.

Desa Cisarua baru dibentuk pada tahun 1979 atas usulan dari para tokoh masyarakat Dusun Cisarua, Dusun Cisarua Caringin, dan Dusun Nagrak. Adapun tokoh-

tokoh masyarakat yang menjadi penggagas berdirinya Desa Cisarua ialah (Alm) M.Rachmat, Maksun Syah, Tjutju, Jaja, Sukardi, Halim, dan Junaini.

Pada Maret 1979, Desa Cisarua berdiri dengan (Alm) Rachmat bertindak sebagai kepala desa. Kantor Desa Cisarua pertama kali menumpang di SD Inpres Cisarua. Lalu pada tahun 1980, dilakukan pembangunan kantor Desa Cisarua. Pembangunan kantor Desa Cisarua pada mulanya dilakukan di balai desa sebelah utara Goalpara. Namun karena letaknya dianggap kurang strategis, lahan tersebut lalu dijual. Hasil penjualan lahan tersebut lalu digunakan untuk membeli lahan yang lebih strategis yaitu ditempat saat ini kantor Desa Cisarua berdiri.

Hingga tahun 2011, Desa Cisarua telah dipimpin oleh 4 kepala desa, yaitu (Alm) M. Rachmat (1979-1988), Ace Sujatman (1989-1999), (Alm) M. Rachmat (2000-2005), dan A. Malik (2005-2011). Desa Cisarua juga pernah dipimpin oleh 2 penanggung jawab sementara (pjs), yaitu Maksun Syah (1988-1989) dan Asep (1999-2000). Berdasarkan sejarah, perkebunan terbentuk terlebih dahulu daripada Desa Cisarua, maka program-program desa mengikuti program perkebunan. Namun ketika kepemimpinan A. Malik keadaan pemerintahan desa berubah. Berbagai program desa berdiri independen dan tidak lagi mengikuti program dari perkebunan dengan alasan bahwa wilayah perkebunan lah yang berada di dalam desa, bukan desa yang berada di dalam wilayah perkebunan.

HASIL PENELITIAN

Petani dan Permasalahannya

Petani di Desa Cisarua dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu petani kecil, petani sedang, dan petani besar sebagaimana yang telah disebutkan di depan. Penelitian ini dilakukan di tiga RW dari delapan RW yang ada di Desa Cisarua, yaitu RW 2, RW 3, dan RW 4. Pada tahun 2003, dari tiga RW diperoleh data bahwa terdapat 760 petani yang menggarap di lahan perkebunan dengan pembagian sebagai berikut: (a) RW 2 sebanyak 350 orang, (b) RW 3 sebanyak 280 orang, dan (c) RW 4 sebanyak 130 orang.

Petani dari ketiga RW diatas menggarap di tiga blok lahan milik perkebunan, yaitu blok 14, blok 15, dan blok 16 dengan pembagian sebagai berikut: (a) blok 14 seluas 30 hektar, (b) blok 15 seluas 38 hektar, dan (c) blok 16 seluas 25 hektar. Total luas lahan keseluruhan yang digarap oleh petani ialah 93 hektar namun hanya 82 hektar saja yang termasuk dalam wilayah Desa Cisarua.

Dari 93 hektar lahan perkebunan dan 760 petani yang menggarap, maka rata-rata per petani menggarap sekitar 3 patok atau setara dengan 0,12 hektar. Seiring berjalannya waktu, ada petani yang kemudian mengambil alih lahan milik petani lain. Pengambilalihan ini tidak didaftarkan sebagai ganti nama sehingga terjadi perbedaan data baik secara *de facto* maupun *de jure*, sebagaimana yang terjadi pada blok 16. Pada awalnya lahan ini diolah oleh sekitar 208 orang petani. Namun saat ini, lahan pada blok 16 telah dikuasai oleh 4 petani besar namun yang bertempat tinggal di RW 2, RW 3, dan RW 4 hanya 3 orang saja.

Berdasarkan sejarah, petani Desa Cisarua terbagi menjadi dua, yaitu petani asli yang merupakan petani yang berasal

dari hasil bedol desa dari Garut dan petani pendatang yang berasal dari Lembang. Petani asli ini didatangkan pada tahun 1928 melalui program bedol desa ketika perkebunan mulai beroperasi dan mulai mendatangkan bibit tanaman teh dari India. Petani ini didatangkan untuk bekerja menjadi buruh di perkebunan. Petani pendatang masuk pada tahun 1990an ke Desa Cisarua dengan tujuan untuk bertani. Petani asli hingga saat ini terus bertahan secara turun temurun menjadi buruh di perkebunan. Mereka menggantungkan hidupnya menjadi buruh perkebunan dengan gaji harian dan berharap akan naik pangkat. Selain itu, petani asli yang bekerja sebagai buruh perkebunan juga mengharapkan uang pensiun ketika mereka tua nanti.

Petani pendatang yang datang dengan tujuan untuk bertani dan mendapatkan pekerjaan terus berupaya untuk mendapatkan lahan garapan. Setelah dilihat bahwa lahan yang memungkinkan untuk digarap hanyalah milik perkebunan dan lahan tersebut dalam keadaan terlantar, petani pendatang pun semakin berkeinginan untuk dapat mengakses lahan tersebut. Penduduk asli desa memaklumi keinginan para pendatang tersebut untuk dapat mengolah lahan perkebunan karena mereka tidak terikat pada masa lalu dengan pihak perkebunan.

Meskipun terdapat luas total 600 hektar lahan perkebunan non-produktif dan dapat dimanfaatkan oleh petani, namun hanya sedikit lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena sebagian besar lahan merupakan tanah tegalan yang sulit air serta memiliki letak lahan yang jauh. Faktor tersebut membuat petani harus bersaing untuk mendapatkan lahan garapan yang ideal dan strategis. Persaingan yang ketat juga merupakan masalah yang dihadapi oleh petani. Ditambah dengan letak geografis Desa Cisarua, membuat lahan terkonsentrasi pada perkebunan dan hutan lindung sehingga lahan pertanian di Desa Cisarua semakin terbatas.

Lahan perkebunan yang petani pendatang inginkan merupakan lahan perkebunan teh yang tanamannya telah tidak produktif. Lahan milik perkebunan yang tidak produktif ada sekitar 600 hektar. Sekitar tahun 1990an, perkebunan melakukan peremajaan tanaman teh. Tanaman yang dianggap sudah tidak produktif lagi dipangkas. Setelah melalui proses pemangkasan kemudian tanaman tersebut dicabut hingga akar. Proses peremajaan kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit teh baru. Pada saat melakukan peremajaan tanaman teh yang non-produktif, perkebunan mengalami kesulitan ekonomi. Harga teh dunia mengalami penurunan yang kemudian mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pihak perkebunan. Hal ini kemudian membuat pihak perkebunan tidak dapat melanjutkan peremajaan tanaman teh dan menelantarkan lahannya. Keadaan lahan yang terlantar dalam kondisi tanaman teh yang kering dan tidak terurus membuat petani pendatang yang menginginkan bertani sendiri tertarik untuk menggunakan lahan tersebut untuk budidaya tanaman hortikultura.

Penduduk asli Desa Cisarua yang berprofesi sebagai buruh perkebunan mengetahui betul bahwa lahan HGU tidak dapat digarap oleh masyarakat. Berdasarkan hal inilah para buruh perkebunan memupuskan harapannya untuk bisa menggarap lahan perkebunan yang terlantar

tersebut. Ketika pihak perkebunan yang mengetahui bahwa ada pihak yang ingin menggarap lahan HGU lalu mereka memanfaatkan situasi tersebut. Pihak perkebunan kemudian meminjamkan lahan tersebut kepada para mandor perkebunan. Tiap mandor mendapat masing-masing 2 hektar lahan namun lahan tersebut akan diambil kembali oleh perkebunan.

Pada kenyataannya, lahan tersebut tidak digarap sendiri oleh para mandor karena mandor merasa tidak memiliki modal dan waktu untuk menggarap lahan yang diberikan perkebunan. Mandor pun memanfaatkan para petani yang menginginkan lahan tersebut. Mandor lalu memberikan lahan tersebut untuk digarap kepada petani dengan luas masing-masing sekitar 0,12 hektar atau setara dengan 3 patok. Lahan tersebut juga menjadi kompensasi kepada para buruh perkebunan yang bekerja mencabut akar tanaman teh namun upahnya belum dibayar. Hal inilah yang menjadi alasan awal mula buruh perkebunan dapat menggarap di lahan perkebunan. Tahun 1998 merupakan tahun dimana perkebunan berencana mengambil kembali lahan tersebut. Namun krisis moneter yang menimpa Indonesia membuat perkebunan tidak mampu menarik kembali lahan yang digarap oleh petani dan hingga saat ini lahan tersebut masih dapat diakses oleh petani.

Mandor mengizinkan petani yang hendak menggunakan lahan tersebut untuk dijadikan wilayah pertanian tanaman hortikultura dengan syarat petani sendiri yang membersihkan lahan tersebut dan petani membayar iuran kepada mandor sebagai pihak perkebunan. Iuran yang dibayar petani pada saat itu ialah sebesar Rp. 15.000,00 per patok. Upaya ini diindikasikan merupakan salah satu taktik yang digunakan perkebunan untuk melanjutkan pembersihan lahan non-produktif dan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan tambahan dana yang digunakan dalam pembayaran pajak kepada pemerintah pusat serta untuk biaya operasional yang tidak dibiayai oleh kantor pusat perkebunan.

Sampai saat ini perkebunan tidak melakukan peminjaman lahan garapan secara langsung karena sesungguhnya lahan HGU yang diinginkan oleh petani tidak boleh digarap kepada petani umum. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa mandor yang dijadikan perpanjangan tangan perkebunan. Mandor di sini selain bertugas untuk memungut iuran, ia juga bertugas untuk menjaga dan mengawasi lahan non-produktif yang digarap petani agar tidak berpindah tangan.

Pihak perkebunan memiliki lahan yang dapat secara resmi digarap oleh masyarakat umum, yaitu lahan *lamping* yang umumnya memiliki letak yang jauh, berkontur ekstrim, dan sulit air. Agar dapat menggarap lahan *lamping* ini, dibutuhkan proses administrasi yang panjang dan membutuhkan biaya besar untuk mengurus perizinan. Untuk mendapatkan hak garap di lahan *lamping* tersebut juga membutuhkan proses yang rumit. Segala keperluan administrasi akan diolah di kantor pusat sehingga membutuhkan waktu yang lama dan modal yang besar. Hal ini semakin membuat petani menjadi enggan untuk menggarap tanah *lamping* dan mendapat tanah garapan secara resmi dari perkebunan. Petani lebih memilih untuk menjadi buruh di perkebunan dengan harapan akan naik

pangkat dan mendapat uang pensiun atau menggarap lahan bekas orang lain..

Mendapatkan lahan garapan dari mandor dan petani lain dianggap lebih mudah karena petani yang ingin menggarap hanya perlu melakukan kompromi dengan pihak yang bersangkutan. Besarnya luas lahan yang diberikan oleh mandor kepada petani didasarkan pada azas kepercayaan dan kuatnya ikatan dengan mandor. Tiap petani yang ingin menggarap lahan perkebunan pada awalnya hanya diberi 3 patok atau setara dengan 0,12 hektar. Jika hasil panen memuaskan, mandor menjadi lebih percaya kepada petani tersebut sehingga ketika petani meminta penambahan luas lahan garapan, mandor memberikannya setahap demi setahap.

Mandor pada saat itu sangat ditakuti dan disegani oleh petani karena mandor memegang kendali terhadap tanah garapan mereka. Jika petani tidak bersikap baik terhadap mandor, maka mandor dapat mengambil kembali lahan garapan dan membuat petani kehilangan pekerjaan. Iuran yang dibayar petani kepada mandor seharusnya hanya dilakukan setahun sekali. Namun pada kenyataannya, petani harus membayar sekitar 3-4 kali setahun tergantung kepada masa panen yang dilakukan petani karena mandor biasanya datang ketika petani sedang melakukan panen.

Terdapat beberapa masalah yang dialami oleh petani yang mempengaruhi pemilihan strategi yang digunakan petani untuk mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan, seperti: (a) modal dan administrasi yang panjang dalam mengurus tanah garapan secara legal, (b) keterbatasan lahan strategis yang terbatas, (c) keberpihakan pemerintah desa kepada petani besar, (d) rendahnya solidaritas antar petani, (e) kecemburuan sosial, dan (f) ketidakmampuan melawan penguasa.

Berdasarkan pernyataan dari para responden dan informan didapat bahwa masalah utama yang dihadapi oleh petani dalam mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan ialah modal. Diakui oleh petani di Desa Cisarua, jika modal cukup, maka akan mudah bagi petani dalam mengakses dan mengolah lahan. Karena modal di sini dibutuhkan untuk mengurus izin penggunaan lahan serta untuk penyediaan sarana dan prasarana produksi. Modal juga diperlukan dalam memperluas lahan garapan dengan cara membeli lahan garapan petani lain yang ada disekitarnya, seperti yang dilakukan beberapa petani yang saat ini menjadi petani besar di Desa Cisarua.

Pada awalnya seluruh petani mendapatkan lahan dengan luas yang merata yaitu sekitar 0,12-0,16 hektar. Dengan modal yang cukup, petani tersebut lalu membeli hak garap petani-petani yang lain. Hak garap dibeli dengan harga yang murah yaitu sekitar Rp. 500.000,00. Selain itu, petani besar juga menggunakan cara pemberian hutang yang kemudian dapat membelit petani kecil. Jika mempunyai modal, maka banyak hal yang tidak mungkin, menjadi mungkin untuk dilakukan. Seperti yang dialami oleh seorang perempuan di Desa Cisarua yang baru pulang dari menjadi TKI di Arab. Dengan memiliki modal yang diperoleh dari menabung selama berkerja di Arab, ia dapat memperoleh hak garap sebesar 8 petak atas namanya sendiri.

Meskipun pihak perkebunan mengizinkan lahan non-produktifnya diolah oleh petani, namun hal ini tidak dibuka kepada umum. Pihak-pihak tertentu saja lah yang dapat mengakses kebijakan perkebunan ini. Pihak-pihak yang dapat mengakses ialah pihak yang dapat memenuhi syarat yang diajukan perkebunan, memiliki akses untuk melakukan negosiasi dengan pihak perkebunan seperti memiliki relasi dan modal. Jika pihak yang dianggap asing mengajukan permohonan hak garap, maka pihak perkebunan akan mengelak dan menyatakan bahwa lahan perkebunan tidak diizinkan untuk digarap oleh petani atau pun orang luar karena merupakan HGU milik perkebunan. Petani yang telah mendapat hak garap pun diperingatkan oleh para mandor untuk tidak memberi informasi kepada pihak luar mengenai penggarapan lahan perkebunan ini.

Masalah lain yang dirasakan oleh petani ialah keberpihakan pemerintah desa. Hal ini telah dirasakan oleh petani Desa Cisarua yang menjadi responden dan informan penelitian ini. Petani merasa pemerintah desa hanya menguntungkan satu pihak saja, yaitu para petani besar. Keberpihakan pemerintah desa kepada petani besar ditunjukkan melalui manipulasi data pengolah lahan perkebunan. Pemerintah desa menggunakan KTP dari petani-petani di Desa Cisarua yang kemudian didaftarkan sebagai penggarap di lahan perkebunan. Namun pada kenyataannya, lahan tersebut hanya diolah oleh petani besar. Selain itu, pemerintah desa juga tidak melakukan tindakan apapun ketika salah satu lahan petani kecil diambil alih kembali oleh pihak perkebunan. Sedangkan ketika lahan petani besar ingin diambil alih, pemerintah melakukan pembelaan agar lahan tersebut tidak jadi diambil alih oleh pihak perkebunan.

Saat ini petani tidak melakukan aksi protes dan hanya memendam kekecewaan terhadap pemerintah desa yang dianggap pilih kasih. Konflik yang terjadi pada petani desa saat ini ialah konflik laten dimana petani hanya memendam dan memegang prinsip azas tahu sama tahu terhadap kekacauan yang terjadi pada pemerintahan desa. Jika hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan dapat memicu terjadinya konflik terbuka. Pemerintah desa dalam hal ini menjadi pihak ketiga dalam perjuangan yang dilakukan oleh petani. Jika dilihat dari sudut pandang perkebunan, pemerintah desa menjadi pihak yang membantu petani untuk mendapatkan serta mempertahankan lahan garapan petani. Namun jika dilihat dari sudut pandang petani kecil, pemerintah desa hanya berpihak dan membantu petani besar sehingga terjadi ketimpangan dalam hak akses lahan di Desa Cisarua.

Keadaan Desa Cisarua sesuai dengan salah satu poin yang diungkapkan Scott (1993), dimana petani tidak dapat melakukan perlawanan kolektif yang disebabkan oleh rasa takut terhadap pembalasan atau penahanan sehingga petani lebih memilih bersikap rendah hati. Petani di Desa Cisarua telah melihat penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada warga di desa tetangga yang melakukan aksi demo dalam rangka memperjuangkan akses dan penguasaan atas lahan perkebunan. Hal ini membuat petani Desa Cisarua menjadi takut untuk melakukan aksi kekerasan. Petani kecil yang merasa tak mampu dan berdaya mengubah "aturan-aturan" di Desa Cisarua ini tak memiliki pilihan lain selain menerima dan

menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Petani kecil merasa tidak mampu jika harus melawan para petani besar. Petani tidak melakukan aksi untuk memperbaiki nasibnya karena petani merasa suaranya tidak akan didengar baik oleh pihak perkebunan maupun pemerintah.

Kecemburuan sosial juga terjadi di Desa Cisarua diakibatkan oleh pandangan petani kepada pemerintah desa yang pilih kasih dan hanya membantu para petani besar saja. Hal ini mengakibatkan petani sulit untuk merumuskan pendapat bersama. Adanya pembagian kelas-kelas seperti petani kecil dan petani besar membuat adanya jarak sosial di Desa Cisarua. Petani kecil tidak berani melawan petani besar karena petani kecil merasa membutuhkan petani besar. Keadaan seperti ini membuat petani tidak berani mengeluarkan aspirasinya. Dengan adanya persaingan antar petani kecil pun, membuat para petani kecil tidak memiliki ikatan yang kuat satu sama lainnya. Persaingan dilakukan dalam hal pertanian dimana petani kecil sama-sama berlomba untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Mereka setiap hari disibukkan dengan rutinitas pertanian sehingga tidak mementingkan petani yang lain dan cenderung memandang petani kecil lain merupakan saingan mereka. Prasangka-prasangka yang ada makin memperburuk hubungan petani satu dengan yang lainnya sehingga sulit untuk menyatukan pendapat.

Prasangka yang timbul di Desa Cisarua tidak hanya terjadi diantara petani kecil dengan petani besar saja. Prasangka juga terjadi antara petani kecil dengan petani kecil serta antara petani kecil dengan pemerintah desa. Prasangka yang terjadi antara petani kecil dengan petani kecil cenderung terjadi akibat persaingan untuk mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Masing-masing individu petani kecil berupaya untuk memaksimalkan hasil panen. Tidak adanya komunikasi dan kerjasama untuk memaksimalkan hasil panen bersama menimbulkan prasangka-prasangka negatif kepada petani kecil lainnya yang dapat memperoleh hasil panen yang bagus. Petani kecil menuduh petani kecil yang lain menggunakan cara-cara negatif sehingga dapat memperoleh hasil panen yang baik.

Satu sisi, petani kecil ingin mendapatkan keadilan. Namun disisi lain ada tekanan bahwa petani kecil membutuhkan petani besar untuk kelangsungan hidupnya. Bagaimana pun juga, petani kecil merasa dengan adanya petani besar, petani kecil sedikit banyak terbantu karena petani besar bisa menjadi tempat para petani kecil meminjam uang sewaktu-waktu baik untuk modal pertanian, keperluan anak sekolah, hingga modal untuk membangun rumah. Hal ini membuat petani kecil memiliki rasa utang budi dan ketergantungan kepada petani besar. Petani kecil tidak menyadari resiko yang ditimbulkan dengan meminjam uang kepada petani besar, yaitu hutang yang terus melilit hingga berakibat pada pengambilan lahan garapan petani kecil dengan alasan untuk mengembalikan hutang-hutang yang ada. Pemberian hutang kepada petani kecil pada dasarnya merupakan salah satu cara petani besar untuk memperluas lahan garapannya. Penduduk asli Desa Cisarua tidak terlalu menyadari bahwa pengambilan lahan garapan oleh petani merupakan suatu masalah yang besar. Hal ini

disebabkan oleh latar belakang para petani asli merupakan buruh perkebunan

Petani Desa Cisarua tidak melakukan upaya untuk mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan dengan tindak kekerasan, demo, ataupun *reclaiming* (ambil paksa) karena petani tahu bahwa lahan yang mereka inginkan merupakan lahan yang legal secara hukum merupakan HGU milik perkebunan dan masih berlaku. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan petani melalui kompromi hanya bertujuan untuk mendapatkan akses terhadap lahan HGU perkebunan non-produktif, bukan untuk menguasai atau memiliki lahan tersebut.

Didukung dengan pandangan petani bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah serta akan makin mempersulit keadaan kaum kecil seperti yang dinyatakan oleh petani kecil sebagai responden dalam penelitian ini, kompromi dianggap merupakan jalan yang lebih baik dibanding dengan melakukan aksi kekerasan serta perlawanan untuk mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan. Petani enggan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh desa tetangga yang dianggap salah. Petani juga merasa tidak akan mampu untuk melawan rezim kekuasaan perkebunan dan pemerintah. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi upaya petani untuk mendapatkan akses atas lahan perkebunan di Desa Cisarua, Kabupaten Sukabumi ialah: (1) keinginan petani untuk menanam tanaman hortikultura untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk tambahan gaji, (2) keadaan lahan strategis yang terbatas, (3) lahan strategis di Desa Cisarua merupakan lahan HGU milik perkebunan, (4) lahan HGU yang diinginkan petani untuk dijadikan lahan garapan dalam keadaan tidak terawat.

Strategi Perjuangan Petani Desa Cisarua

Petani di Desa Cisarua melakukan upaya mendapatkan lahan perkebunan dengan melakukan perlawanan yang oleh Scott (1981) disebut sebagai bentuk perlawanan "Gaya Asia". Dalam penelitian ini, Gaya Asia yang diungkapkan Scott hanya digunakan sebagai rujukan dalam pola perjuangan namun tidak merujuk kepada pertimbangan keharmonisan dan moral kebersamaan dalam melakukan perjuangan. Pola perjuangan yang dilakukan petani di Desa Cisarua termasuk dalam pola perjuangan Gaya Asia karena dalam melakukan perjuangan, petani di Desa Cisarua: (a) tidak memiliki organisasi formal, (b) melakukan perjuangan kecil secara sembunyi-sembunyi dengan berpura-pura bodoh, dan (c) perjuangan yang dilakukan petani tidak membutuhkan koordinasi.

Petani di Desa Cisarua tidak memiliki organisasi formal. Organisasi yang ada di desa ini dipimpin oleh HO. Seluruh warga desa mengetahui bahwa HO adalah pemimpin mereka. HO merupakan warga asal Lembang, Jawa Barat. Pada awalnya ia hanyalah seorang supir truk pengantar pupuk ke wilayah Desa Cisarua. Karena sering datang ke desa ini, ia melihat banyak lahan kosong yang tidak termanfaatkan serta lahan milik perkebunan yang tidak terawat. Lalu ia menyewa lahan dan mencoba bertani di Desa Cisarua. Ternyata, panen perdana yang dilakukan HO berhasil. Melihat keberhasilan HO dan keluarganya, banyak tetangga HO di Lembang tertarik

dan ikut merantau ke Desa Cisarua. Mereka lalu menjadi buruh di lahan pertanian HO hingga kini.

Ada pula sistem plasma yang dilakukan oleh AA, adik HO kepada 15 orang. Para juragan ini mengembangkan sebuah sistem yang dinamai plasma yang sesungguhnya merupakan ikatan patron klien. Sistem seperti ini membuat suatu pola yang mengikat anggota plasma kepada juragan dan membuat anggota plasma makin terjatuh hutang sehingga membuat anggota plasma menjadikan dirinya buruh gratis secara tidak langsung karena segala hasil panen disetorkan kepada juragan untuk membayar hutang. Hasil panen anggota plasma sering kali dihargai lebih rendah dari pasaran hal ini membuat hutang anggota plasma makin lama makin menumpuk. Anggota plasma tidak memiliki hak untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanam, merek benih yang akan dipakai, pupuk yang akan dipakai, dan berbagai sarana dan prasarana yang akan digunakan selama proses produksi. Segala hal yang akan digunakan ditentukan dan disediakan oleh juragan.

Hasil panen yang diperoleh juragan meningkat tiap musim panen. Hal ini membuat pendapatan juragan semakin banyak. Dengan uang itu, juragan terus memperluas daerah garapannya dengan mengambil lahan garapan petani yang kehabisan modal. Keinginannya untuk memperluas lahan garapan terhalangi oleh kebijakan pemerintah desa pada saat itu. Kepala desa tidak menyetujui upaya juragan untuk menambah lahan garapan. Saat itu, prinsip pemerintahan desa ialah "program desa mengikuti program perkebunan". Hal ini terjadi karena berdasarkan sejarah, Desa Cisarua berdiri karena adanya perkebunan terlebih dahulu.

Pada tahun 1995, terjadi pemilihan kepala desa untuk yang keempat kalinya. Juragan ingin memanfaatkan kesempatan politik ini agar niatnya untuk mempertahankan dan memperluas lahan pertanian bisa terwujud. Ia lalu mencalonkan A sebagai kepala desa untuk menyaingi kepala desa yang lama dalam pencalonan menjadi kepala desa periode 2005-2011. Juragan mendukung secara penuh kebutuhan dalam pencalonan menjadi kepala desa terutama dalam hal kebutuhan materi. Ketika kepala desa A terpilih menjadi kepala desa yang baru, prinsip pemerintahan desa pun berubah. Program-program desa tidak lagi mengikuti program perkebunan. Saat ini desa berusaha menjadi pihak yang otonom. Malah terkesan, hubungan antara pemerintahan desa dengan pihak perkebunan kurang akur.

Dukungan pemerintahan desa kepada juragan semakin terlihat pada saat pihak perkebunan berniat mengganti komoditas yang ditanam oleh petani menjadi rumput untuk pakan ternak. Perkebunan menawarkan pembangunan kandang sapi dan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 per ekor sapi bagi petani yang bersedia menyerahkan tanahnya kembali kepada perkebunan. Pemerintah desa menolak program yang ditawarkan oleh perkebunan dengan alasan jika komoditi yang ditanam diganti dengan rumput, maka PAD (Pendapatan Asli Daerah) menurun. Rapat yang melibatkan pihak pemerintah, petani, dan perkebunan ini berlangsung sebanyak 3 kali hingga dicapai keputusan bahwa lahan tersebut tetap diolah oleh petani. Keputusan seperti ini

tidak akan terjadi ketika masa pemerintahan desa yang lalu.

Saat ini, juragan telah menguasai 25 hektar lahan milik perkebunan dan 10 hektar tanah bengkok desa dengan pendapatan perbulan mencapai Rp. 40.000.000,00. Lahan ini dijadikan lahan pertanian tanaman hortikultura dengan komoditi berupa tomat, sawi, dan cabe. Tidak mudah bagi juragan untuk mendapatkan lahan garapan seluas ini. Lahan yang pertama kali diolah oleh juragan merupakan area bekas penebangan tanaman teh yang sudah tidak produktif. Juragan diperbolehkan menggarap di lahan tersebut karena pihak perkebunan sedang mengalami masalah ekonomi seperti yang telah dipaparkan di atas.

Bentuk perlawanan kecil yang dilakukan di Desa Cisarua ialah memperluas lahan garapan secara diam-diam dengan koordinasi yang dilakukan hanya berdasarkan azas asal sama tahu saja. Organisasi yang anonim, bersifat nonformal melalui koordinasi asal sama tahu saja, dengan bentuk perlawanan kecil dan sembunyi-sembunyi yang dilakukan setiap hari oleh petani Desa Cisarua dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian serta berpura-pura bodoh dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa lahan yang mereka garap merupakan tanah HGU yang tidak boleh digarap oleh petani. Namun jika mandor mengetahui perluasan lahan yang dilakukan oleh petani, petani kemudian melakukan kompromi dengan mandor yang kemudian berujung pada pembayaran sewa seluas lahan yang digarap. Berhubung tanah tersebut belum digunakan oleh pihak perkebunan, maka mandor pun setuju.

Berdasarkan perjuangan yang dilakukan oleh petani di Desa Cisarua, jika dilihat berdasarkan pemikiran Scott, sifat strategi perjuangan yang dilakukan oleh petani di Desa Cisarua ialah Perlawanan "insidental" karena ditandai oleh: (a) tidak terorganisasi, tidak sistematis, dan individual, (b) bersifat untung-untungan dan pamrih, (c) tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan (d) dalam maksud dan logika mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominan yang ada.

Jelas terlihat di sini bahwa perjuangan yang dilakukan oleh petani ialah bersifat individual. Petani tidak melakukan perjuangan secara kolektif. Petani yang ingin menggarap lahan perkebunan melakukan upaya seorang diri agar keinginannya tersebut berhasil. Perjuangan yang dilakukan petani juga tidaklah sistematis dan tidak terorganisasi secara formal, hanya bergantung pada kesempatan yang terbuka. Segala bentuk perjuangan yang dilakukan oleh petani juga tidak memiliki dampak revolusioner karena tidak ada bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan petani dapat mengubah sistem secara cepat dan berdampak luas. Tidak ada perubahan-perubahan besar yang terjadi setelah perjuangan petani dilakukan, baik bagi pihak pemerintah, perkebunan, maupun petani itu sendiri.

Perjuangan yang dilakukan oleh petani di Desa Cisarua juga bersifat untung-untungan dan pamrih dimana petani melakukan perjuangan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan pribadi. Namun jika setelah melakukan perjuangan ia tetap tidak mendapatkan lahan, mereka tidak melakukan tindak lanjut lagi. Dalam kata lain, jika

setelah melakukan perjuangan ia mendapatkan lahan maka syukur. Namun jika tidak mendapatkan lahan, ya mau bagaimana lagi. Petani menyadari bahwa kapasitasnya tidak memungkinkan jika dibandingkan dengan petani-petani besar baik dari segi modal maupun relasi. Petani hanya bisa memaklumi dan pasrah terhadap apa yang terjadi. Jalan lain jika ia tidak mendapatkan lahan, maka ia akan menjadi buruh tani saja dan berbesar hati bahwa inilah jalan hidup mereka dan tidak berfikir untuk mendapatkan yang lebih.

Dari hal ini juga dapat dilihat bahwa petani, baik petani besar dan petani kecil melakukan perjuangan tanpa maksud untuk menentang sistem dominan yang ada. Petani besar melakukan perjuangan dengan meminta langsung kepada pihak perkebunan, tanpa maksud untuk menentang kebijakan dari perkebunan. Karena pada dasarnya perkebunan telah memiliki program menggarap lahannya yang belum produktif namun hanya untuk pegawai perkebunan saja. Petani besar kemudian melakukan negosiasi dengan pihak perkebunan yang kemudian mengizinkan petani besar mengolah lahan tersebut dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Petani kecil juga tidak melakukan penentangan terhadap kekuasaan petani besar. Dalam hal ini, baik pihak perkebunan maupun pihak petani sama-sama melakukan penyesuaian demi tercapainya tujuan bersama.

Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ecstein (1989) dalam Mustain (2007) bahwa petani lebih menyukai bentuk perlawanan secara diam-diam atau terselubung dibanding dengan secara terang-terangan terjadi di Desa Cisarua. Petani Desa Cisarua mengatakan bahwa kekerasan tidak diperlukan dalam perjuangan untuk mendapatkan lahan karena kekerasan tidak akan memecahkan masalah yang ada, namun akan membuat keadaan semakin kacau. Petani juga mengalami kekhawatiran akan dipenjara jika melawan pihak perkebunan seperti yang terjadi di desa tetangga karena petani tahu betul tanah tersebut merupakan tanah HGU milik perkebunan. Dengan adanya pandangan seperti itu, maka petani di Desa Cisarua tidak melakukan penggalangan massa untuk mendapatkan lahan garapan dari pihak perkebunan.

Bentuk perjuangan petani di Desa Cisarua, jika dilihat dari Sitorus (2006) maka termasuk dalam tipe perjuangan kultivasi. Satu sisi, tanah secara faktual ditanami atau diusahakan oleh penduduk tapi di sisi lain tanah juga masih diklaim dan juga secara faktual dikelola sebagai bagian dari perkebunan.

Secara garis besar, runutan bentuk strategi yang dilakukan petani Desa Cisarua untuk mendapatkan lahan ialah: (1) menyewa lahan garapan kepada mandor, (2) memperluas lahan garapan secara diam-diam dan sedikit demi sedikit, dan (3) petani besar terus memperluas lahan dengan mengambil lahan garapan petani kecil lainnya. Petani yang tidak memiliki cukup modal, lalu menjadi buruh perkebunan.

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Strategi Perjuangan Petani

Dalam melakukan upaya untuk mendapatkan lahan, strategi yang dilakukan di setiap daerah tidaklah sama. Strategi yang diterapkan di Desa Cisarua dipengaruhi

oleh: (1) status lahan yang diinginkan oleh petani dan (2) tujuan petani tersebut. Petani Desa Cisarua mengetahui bahwa status lahan yang mereka inginkan merupakan lahan HGU legal milik perkebunan negara, bukanlah lahan sengketa, dan bukanlah lahan milik petani yang kemudian diambil oleh pihak perkebunan. Oleh karena itu, petani cenderung tidak dapat melakukan tindakan radikal untuk mendapatkan lahan tersebut. Strategi yang dipilih oleh petani juga disesuaikan dengan tujuan petani, yaitu mendapatkan akses untuk menggarap di lahan perkebunan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, petani menggunakan strategi yang lebih aman dan lebih lembut sesuai dengan kondisi di desa.

Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keterlibatan petani dalam upaya mendapatkan lahan. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan situasi dan kondisi dari luar individu petani yang dapat mempengaruhi strategi yang digunakan petani dalam mendapatkan lahan perkebunan. Dalam penelitian ini, faktor eksternal dapat berasal dari: (1) organisasi pendukung, (2) kesempatan politik yang digunakan, serta (3) respon pemerintah dan respon dari pihak perkebunan.

Desa Cisarua tidak memiliki organisasi yang mendukung petani dalam hal mendapatkan lahan perkebunan. Organisasi pendukung di sini dianalogikan sebagai katalis yang dapat menyadarkan serta mengarahkan petani. Organisasi pendukung juga bisa menjadi suatu wadah dimana petani dapat bertukar pikiran dan kemudian menyamakan tujuan sehingga pada akhirnya membuat petani bergerak secara kolektif. Desa Cisarua tidak memiliki organisasi dan tidak ada organisasi yang berusaha menyadarkan dan mempersatukan petani. Hal ini kemudian dapat mempengaruhi kesolidan antar petani dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi strategi perjuangan petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing dalam hal ini untuk mendapatkan lahan garapan.

Kesempatan politik merupakan situasi politik yang dapat digunakan sebagai momentum untuk memperlancar usaha petani dalam mendapatkan lahan. Seiring dengan Era Reformasi dimana kaum terpinggirkan bebas untuk berpolitik, masyarakat secara tegas memutuskan untuk bertindak mengatasi kemelut pertanahan yang mereka hadapi (Moniaga, 2010). Demikian pula yang terjadi di Desa Cisarua, dimana petani berani memanfaatkan era reformasi untuk mencapai tujuannya untuk mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan. Petani di Desa Cisarua berani melakukan berbagai upaya karena merasa bebas untuk melakukan berbagai tindakan di era reformasi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh petani ialah memanfaatkan pemilihan kepala desa sebagai titik balik perubahan kebijakan-kebijakan yang menghambat perjuangan petani untuk mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan milik perkebunan.

Pada tahun 2005 yang telah masuk dalam era reformasi, di Desa Cisarua dilakukan pemilihan kepala desa untuk yang keempat kalinya dan dilakukan secara demokratis. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesempatan politik yang ada di daerah. Kesempatan inilah

yang dimanfaatkan para petani besar agar ketika terpilih nanti, kepala desa baru mendukung upaya yang dilakukan petani besar untuk mendapatkan lahan perkebunan.

Dukungan petani besar ditunjukkan dengan pemberian dukungan moral dan finansial kepada salah satu calon kepala desa yang ikut dalam pemilihan kepala Desa Cisarua. Agar mendapat banyak dukungan, calon kepala desa yang didukung oleh petani besar ini mengangkat tema mengenai pembagian lahan kepada petani kecil sebagai salah satu visi dan misi yang akan dilaksanakan ketika ia terpilih nanti. Namun ketika kepala desa tersebut menjabat, janji-janji yang diungkapkan pada kampanye tidak terlaksana karena pada akhirnya yang diuntungkan hanyalah para petani besar saja. Hal ini membuat para petani kecil kecewa terhadap pemerintah dan membuat petani enggan untuk bersatu.

Adanya kecemburuan sosial yang ditimbulkan oleh sikap dan respon pemerintah desa terhadap petani menimbulkan kecurigaan terhadap sesama petani sehingga membuat kepercayaan antar petani menjadi rendah. Rasa solidaritas serta rasa kesamaan nasib petani di Desa Cisarua juga sangat rendah. Seluruh petani berlomba-lomba untuk membuat kaya diri sendiri dengan kata lain, tidak memiliki semangat komunal. Hal ini menunjukkan bahwa respon pemerintah juga memiliki dampak yang sangat luas terhadap petaninya dan dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan petani serta strategi perjuangan yang dilakukan petani untuk mendapatkan lahan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Mustain (2007), bahwa sikap saling curiga antar sesama petani, munculnya kesenjangan sosial serta golongan kaum borjuis dapat mempengaruhi solidaritas gerakan petani.

Respon positif yang diberikan pihak perkebunan kepada petani bukanlah tanpa tujuan. Jalan ini dilakukan karena pihak perkebunan juga mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu: (1) mengurangi biaya perawatan lahan yang kurang produktif, (2) lahan tetap dapat terawasi dengan baik, (3) sumber pendapatan baru bagi pihak perkebunan dalam membayar pajak dan biaya operasional lainnya. Respon positif yang diberikan pihak perkebunan membuat petani tidak perlu melakukan perlawanan secara radikal. Petani hanya perlu mendatangi mandor-mandor yang bertugas untuk menjaga area tertentu dan melakukan negosiasi agar mereka diperbolehkan untuk menggarap di lahan tersebut.

Bentuk perlawanan gaya Scottian dimana petani mengumpat, menggerutu, dan berpura-pura bodoh dilakukan oleh petani Desa Cisarua. Gaya Scottian dilakukan bukan dalam upaya untuk perlawanan namun sebagai bentuk perjuangan petani untuk mendapatkan akses lahan perkebunan. Dalam hal ini, petani berpura-pura tidak mengetahui bahwa lahan yang mereka garap merupakan tanah HGU perkebunan yang tidak boleh digarap oleh masyarakat. Petani juga melakukan perluasan secara diam-diam hingga suatu ketika mandor memergoki.

Untuk mencapai tujuan, petani biasanya menggunakan penggalangan massa karena semakin besarnya jumlah massa yang ikut maka akan semakin didengar suara mereka. Di Desa Cisarua, merujuk pada pernyataan Wolf

(1966) dalam Mustain (2007), tidak dilakukan penggalangan massa karena kurang adanya kerjasama dalam petani dan petani terjebak dalam irama pekerjaan sektor pertanian. Kurang adanya kerjasama antar petani di Desa Cisarua dapat dilihat dari sikap petani ketika petani lain sedang mengalami masalah dalam bidang pertanian. Petani Desa Cisarua juga menghabiskan banyak waktunya untuk mengerjakan kegiatan pertanian sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk mengerjakan hal lain. Selain itu, faktor yang paling mempengaruhi ialah petani merasa tidak perlu dilakukan penggalangan massa karena status lahan yang diinginkan dan tujuan yang ingin dicapai petani tidak mengharuskan penggunaan penggalangan massa.

Tabel 3. Hasil Uji SPSS *Rank Spearman* Hubungan Faktor Internal dengan Tingkat Keterlibatan Petani dalam Upaya Mendapatkan Lahan Garapan

Variabel	Sig (2-tailed)	Corelation Coefficient
Pengalaman Berorganisasi	0,940	0,013
Luas dan Jumlah Relasi	0,021	0,395*
Lama Pendidikan	0,232	-0,210
Tingkat Pendapatan	0,957	-0,010
Jumlah Tanggungan	0,773	-0,051

Keterangan: * Uji pada $\alpha=0,05$

Selain faktor eksternal, faktor internal juga mempengaruhi keterlibatan petani dalam upaya mendapatkan lahan garapan. Adapun faktor-faktor internal yang dikaji dalam penelitian ini ialah: (1) pengalaman berorganisasi petani, (2) lama pendidikan yang ditempuh, (3) jumlah pendapatan, (4) jumlah tanggungan, serta (5) luas dan jumlah relasi yang dimiliki oleh petani Desa Cisarua. Faktor internal tersebut diuji secara kuantitatif menggunakan SPSS untuk mengetahui apakah ada hubungannya dengan tingkat keterlibatan petani dalam upaya mendapatkan lahan garapan. Hasil uji SPSS yang dilakukan antara variabel pengalaman berorganisasi dengan variabel tingkat keterlibatan petani dalam upaya untuk mendapatkan lahan garapan dapat dilihat pada Tabel 3.

Pengalaman berorganisasi pada awalnya dihipotesiskan memiliki hubungan positif dengan tingkat keterlibatan petani dalam upaya untuk mendapatkan lahan. Pada kasus ini ternyata pengalaman organisasi tidak ada hubungannya dengan tingkat keterlibatan petani dalam upaya untuk mendapatkan lahan yang diukur dengan peran petani dalam organisasi perjuangan dan partisipasi dalam aksi massa. Hal ini disebabkan karena pada awal penelitian diasumsikan bahwa petani di Desa Cisarua menggunakan aksi massa untuk mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan. Namun yang ditemukan ialah petani bergerak secara individual untuk mendapatkan lahan garapan. Selain itu, di Desa Cisarua tidak ada organisasi yang dibentuk untuk mendukung perjuangan petani untuk mendapatkan akses lahan.

Dari tabel hasil pengolahan data menggunakan SPSS di atas, didapatkan hasil bahwa luas dan jumlah relasi petani Desa Cisarua memiliki hubungan dengan tingkat keterlibatan petani dalam upaya untuk mendapatkan lahan garapan. Hubungan antara dua variabel ini merupakan hubungan korelasi positif yang ditunjukkan oleh *Correlation Coefficient* sebesar 0,395. Semakin tinggi luas dan jumlah relasi yang dimiliki petani maka keterlibatan petani dalam mendapatkan lahan garapan semakin tinggi pula. Tingkat kepercayaan yang didapat dari penghitungan antara hubungan luas dan jumlah relasi dengan keterlibatan petani dalam gerakan menggunakan SPSS yaitu sebesar 95 persen. Hasil penghitungan SPSS juga sesuai dengan kondisi yang terjadi di Desa Cisarua. Jika petani memiliki relasi baik dengan pihak perkebunan maupun pemerintah maka semakin tinggi pula keterlibatannya dalam upaya yang dilakukan. Semakin banyak dan kuat ikatan yang dimiliki petani dengan pihak-pihak terkait maka akan semakin mudah petani mendapatkan lahan garapan dari pihak perkebunan. Pihak-pihak terkait dalam hal ini ialah pemerintah desa dan pihak perkebunan.

Pendidikan juga merupakan salah satu variabel yang diuji menggunakan SPSS untuk mengetahui hubungannya dengan tingkat keterlibatan petani dalam upaya mendapatkan lahan garapan. Tabel di atas merupakan hasil penghitungan menggunakan SPSS dimana Sig. sebesar 0,232 menunjukkan bahwa pendidikan tidak memiliki hubungan dengan keterlibatan petani dalam upaya untuk mendapatkan lahan garapan. Hal ini disebabkan karena tingkat keterlibatan petani dalam kasus ini dilihat dari peran dalam organisasi perjuangan dan aksi massa yang dilakukan. Desa Cisarua tidak memiliki organisasi perjuangan dan tidak melakukan aksi massa untuk mendapatkan lahan garapan. Lama pendidikan yang ditempuh oleh petani di Desa Cisarua juga mayoritas berada didalam selang yang sama, yaitu rendah. Hasil penghitungan didukung dengan keadaan di Desa Cisarua dimana petani yang memiliki pendidikan tinggi tidak memiliki keterlibatan yang rendah dalam upaya mendapatkan lahan tidak rendah. Demikian juga sebaliknya, petani yang berpendidikan rendah, tidak memiliki keterlibatan yang tinggi pula dalam perjuangan yang dilakukan secara individual.

Pendapatan petani dihipotesiskan memiliki hubungan positif dengan tingkat keterlibatan petani dalam upaya untuk mendapatkan lahan garapan. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penghitungan SPSS dimana nilai Sig. menunjukkan nilai sebesar 0,957. Nilai ini berada diatas nilai α yang mungkin yaitu 0,05 ataupun 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan tidak memiliki hubungan dengan tingkat keterlibatan petani dalam upaya mendapatkan lahan garapan. Meskipun petani memiliki pendapatan yang tinggi, namun bukan jaminan bahwa keterlibatan petani menjadi rendah. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah pendapatan bukan merupakan jaminan bahwa keterlibatan petani akan semakin tinggi. Dari kuesioner yang disebarkan, didapat data bahwa 23 responden atau sekitar 68 persen petani yang menjadi responden memiliki pendapatan dibawah UMR rata-rata pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Hasil uji SPSS di atas juga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel jumlah tanggungan dengan tingkat keterlibatan petani dalam upaya untuk mendapatkan lahan garapan. Meski semakin banyak atau sedikit jumlah tanggungan petani tidak mempengaruhi tingkat keterlibatan petani dalam upaya mendapatkan lahan garapan. Hal ini disebabkan karena sebaran yang diperoleh dari responden ialah sebagian besar memiliki jumlah tanggungan yang sama, yaitu sedang. Selain itu, di Desa Cisarua juga tidak ada organisasi pendukung dan aksi massa yang dijadikan ukuran tingkat keterlibatan petani dalam upaya untuk mendapatkan lahan garapan dari perkebunan.

Tingkat Keberhasilan Petani

Tingkat keberhasilan petani dalam mendapatkan lahan dalam hal ini dilihat dari status tanah yang mereka olah. Status tanah dibedakan oleh peneliti menjadi tiga, yaitu pinjam pakai, sewa, dan hak milik. Pinjam pakai merupakan situasi dimana petani dapat mengolah lahan perkebunan namun tanpa adanya beban biaya yang harus dibayar oleh petani. Sistem sewa merupakan kondisi dimana petani membayar sejumlah uang kepada pihak perkebunan yang dihitung berdasarkan luas lahan yang digarap. Kedua sistem ini dapat terikat dengan perjanjian maupun tidak dengan perjanjian yang jelas.

Petani Desa Cisarua pada nyatanya mengolah pada lahan sewa, baik dengan perjanjian maupun tidak dengan perjanjian. Lahan dengan sistem sewa tidak dengan perjanjian dapat dipakai oleh petani selama lahan tersebut tidak dipakai oleh pihak perkebunan namun petani dibebani iuran yang wajib dibayar setahun sekali. Besaran iuran yang wajib dibayarkan terus meningkat setiap tahun. Saat ini, besar iuran yang wajib dibayar oleh petani ialah Rp. 60.000,00 per patok per tahun. Untuk diketahui, dalam 1 hektar tanah terdapat 25 patok.

Sistem sewa dengan perjanjian yang diperpanjang setiap masa panen berlaku untuk petani yang menanam pohon kayu albasia dan bukanlah petani tanaman hortikultura. Hal ini terjadi karena petani tersebut mengikuti program yang diadakan oleh pihak perkebunan dengan tujuan untuk menambah pohon tegakan di kawasan perkebunan. Adapun alasan petani mengikuti program ini ialah lahan garapan mereka memiliki kontur dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman hortikultura dan mereka tidak memiliki keahlian yang cukup untuk bertani tanaman hortikultura. Perjanjian yang dilakukan dengan pihak perkebunan ialah 20 persen dari pohon tegakan yang ditanam tidak boleh ditebang. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pihak perkebunan yaitu menjaga daerah resapan air dan menjaga agar tidak erosi dengan menambah tegakan pohon di wilayah perkebunan. Namun pada kenyataannya, 20 persen dari pohon yang seharusnya ditinggalkan tetap ditebang dan uangnya disetorkan kepada pihak perkebunan. Oleh karena itu, pohon tegakan di wilayah perkebunan tidak bertambah hingga saat ini.

Adapula petani yang membayar kepada mandor dengan sistem bagi hasil dengan perbandingan 30:70 untuk mandor. Mandor mendapat porsi yang lebih besar karena mandor lah yang memberi modal dan memberi tanah.

Petani hanya tinggal mengolah lahan tersebut hingga panen. Tidak banyak petani yang menerapkan sistem bagi hasil ini karena mandor yang memilih siapa saja orang yang mengikuti sistem bagi hasil atau sistem iuran. Yang mengolah lahan dengan sistem bagi hasil ini ialah petani yang handal namun tidak memiliki modal dan mandor percaya kepada petani tersebut, terkadang mereka memiliki hubungan keluarga.

Petani Desa Cisarua tidak melakukan upaya untuk memiliki lahan perkebunan karena mereka menyadari bahwa tanah tersebut merupakan tanah HGU yang diberikan oleh pemerintah kepada perkebunan. Petani menyadari sepenuhnya bahwa tanah tersebut tidak dapat menjadi hak milik pribadi. Hal ini pula yang membuat petani tidak melakukan aksi-aksi radikal untuk memiliki lahan tersebut. Petani merasa hanya dengan melakukan kompromi, tujuan mereka telah tercapai. Petani juga sudah merasa cukup puas dengan dapat melanjutkan hidup dengan menggarap lahan perkebunan meski tanpa kepastian jangka waktu yang diperbolehkan oleh pihak perkebunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh petani Desa Cisarua seperti administrasi panjang serta memakan waktu cukup lama untuk mendapatkan lahan garapan secara legal di tanah *lamping* milik perkebunan, terbatasnya lahan strategis, keberpihakan pemerintah pada petani besar, solidaritas petani yang rendah, kecemburuan sosial, kecurigaan yang terjadi antar petani dan pemerintah desa, serta ketidakmampuan masyarakat untuk melawan penguasa.

Upaya perjuangan yang dilakukan petani di Desa Cisarua termasuk dalam perjuangan Gaya Asia dan jenis perlawanan insidental yang diungkapkan oleh Scott. Jika dianalisis menurut Sitorus (2006), perjuangan petani Desa Cisarua termasuk perjuangan kultivasi dimana secara faktual tanah ditanami oleh petani, namun di sisi lain juga masih diklaim dan juga masih dikelola oleh pihak perkebunan. Petani Desa Cisarua melakukan kompromi dengan mandor secara individual. Kompromi dianggap lebih menguntungkan bagi masyarakat dibanding dengan melakukan tindakan kekerasan. Setelah melakukan kompromi, petani kemudian diharuskan membayar sewa yang dihitung sesuai dengan banyaknya patok yang digarap. Luas satu patok lahan setara dengan 0,04 hektar. Sewa ini dibayar setahun sekali oleh petani kepada mandor. Setelah mendapatkan lahan, petani kemudian memperluas lahan sedikit demi sedikit yang dilakukan secara diam-diam agar tidak ketahuan oleh mandor.

Ada dua faktor yang berhubungan dengan tingkat keterlibatan petani dalam upaya untuk mendapatkan lahan garapan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari diri petani tersebut. Faktor internal dibedakan menjadi pengalaman berorganisasi, lama pendidikan, tingkat pendapatan, jumlah tanggungan, serta luas dan jumlah relasi. Dari lima faktor internal yang diuji secara kuantitatif menggunakan *Rank Spearman*, hanya luas dan jumlah relasi yang memiliki hubungan dengan tingkat keterlibatan petani dalam upaya untuk mendapatkan lahan

garapan. Hubungan yang diperoleh ialah hubungan positif, dimana ketika jumlah dan luas relasi meningkat maka tingkat keterlibatan petani dalam upaya untuk mendapatkan lahan juga semakin meningkat dengan tingkat kepercayaan hasil sebesar 95 persen.

Faktor eksternal yang diuji secara kualitatif menunjukkan bahwa organisasi pendukung, kesempatan politik, dan respon pemerintah desa serta respon pihak perkebunan juga memiliki hubungan dengan tingkat keterlibatan petani. Selain ketiga faktor eksternal tersebut, ditemukan bahwa hal yang paling berpengaruh terhadap strategi perjuangan yang dipilih oleh petani di Desa Cisarua ialah status lahan yang diinginkan oleh petani serta tujuan dari petani itu sendiri. Setelah melakukan upaya untuk mendapatkan lahan, masyarakat Desa Cisarua akhirnya dapat menggarap lahan dengan status sewa dan bagi hasil dengan pihak perkebunan. Sistem sewa terbagi lagi ke dalam sistem sewa tidak dengan perjanjian serta sistem sewa dengan perjanjian. Sistem bagi hasil dengan komposisi 30:70 hanya berlaku untuk petani handal namun tidak memiliki modal.

Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi keadaan di Desa Cisarua berkaitan dengan strategi petani untuk mendapatkan akses terhadap lahan perkebunan, yaitu:

1. Perlu memperkuat ikatan antar petani karena terlihat jelas dari hasil penelitian ini bahwa ikatan antar petani di Desa Cisarua masih sangat rendah. Perlu dibentuk suatu wadah yang dapat menjadi tempat bagi para petani untuk saling berinteraksi serta berkomunikasi. Agar terbentuk rasa solidaritas, kesamaan nasib serta semangat komunal dalam diri petani
2. Pemerintah desa diharapkan bertindak adil kepada seluruh petani. Tidak hanya petani besar saja yang dibela dan diperhatikan, namun juga petani kecil. Jika pemerintah desa tidak memperbaiki citra dan sikapnya terhadap petani kecil, dikhawatirkan konflik laten yang terjadi dalam diri petani kecil berkembang menjadi konflik terbuka.
3. Pihak perkebunan diharapkan dapat menyediakan alternatif usaha lain bagi petani sebelum lahan garapan ditarik kembali. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pengangguran besar-besaran akibat hilangnya lahan garapan yang menjadi sumber pendapatan petani di Desa Cisarua ketika lahan garapan ditarik kembali oleh pihak perkebunan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan radikal yang dapat dilakukan oleh petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Gutomo Bayu. 2005. Tanah Untuk Penggarap: Pengalaman Serikat Petani Pasundan Menggarap Lahan-Lahan Perkebunan dan Kehutanan. Bogor: Pustaka Latin.
- Anonimous. 2009. Sejuta Ha Lahan Pertanian di Jawa Berubah Fungsi.

- www.amline.edu/apakabar/basisdata/1997/09/17/0038.html (diakses pada 8 april 2010 pukul 13.00 WIB)
- Anonimous. 2009. Warga Patoki Lahan di Areal PTPN Goalpara.
<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/09/02/16/31846-warga-patoki-lahan-di-areal-ptpn-goalpara> (diakses pada 22 juni 2010 pukul 19.15 WIB)
- Anonimous. 2010. Profil PTPN Jawa Barat.
www.kpbptpn.co.id/profileptpn (diakses pada 19 Juni 2010 pukul 17.40 WIB)
- Bachriadi, Dianto dan Anton Lucas. 2001. Merampas Tanah Rakyat, Kasus Tapos dan Cimacan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Bahari, Syaiful dan Ika N. Krishnayanti. 2005. Tanah Untuk Penggarap: Merintis Tataguna Lahan di Pasir Randu. Jakarta: Sekretariat Bina Desa.
- Bakker, Laurens. 2010. ‘‘Dapatkan Kami Memperoleh Hak Ulayat?’’ Tanah dan Masyarakat di Kabupaten Paser Dan Nunukan, Kalimantan Timur’. Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi Tentang Tanah, Kekayaan Alam, dan Ruang di Masa Kolonial dan Desentralisasi (Jakarta). Huma Press. Hal 183-212.
- Febriana, Yohana Desi. 2008. Partisipasi Masyarakat dalam Program Corporate Sosial Responsibility ‘‘Kampung Siaga Indosat’’ (Studi Kasus: RW 04, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Skripsi. IPB. Bogor.
- Hafid, J.O.S. 2001. Perlawanan Petani, Kasus Tanah Jenggawah. Bogor: Pustaka Latin
- McAdam, Doug dan David A.Snow. 1997. Social Movemenst: Reading on Their Emergence, Mobilization, and Dynamics. United States: Roxbury Publishing Company.
- Moniaga, Sandra. 2010. ‘Antara Hukum Negara dan Realitas Sosial Politik di Tataran Kabupaten, Perjuangan Mempertahankan Hak Atas Tanah Adat di Perdesaan Banten’. Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi Tentang Tanah, Kekayaan Alam, dan Ruang di Masa Kolonial dan Desentralisasi (Jakarta). Huma Press. Hal 143-182.
- Mustain. 2007. Petani VS Negara, Gerakan Sosial Petani Melawan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Popkin, Samuel L. 1979. The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam. United States: University of California Press.
- Scott, James C. 1993. Perlawanan Kaum Tani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. 1981. Moral Ekonomi Petani. Jakarta: LP3ES.
- Serikat Tani Bengkulu. 2006. ‘Pembagian Tanah Hasil Reclaiming Pada Transmigrasi’. Jurnal Pembaharuan Desa dan Agraria (Bogor). Volume III Tahun III.
- Shohibudin, Moh. 2007. ‘Dimensi Etis Dalam Revitalisasi Identitas Ngata Untuk Klaim Atas Teritori dan Sumberdaya Lokal, Perjuangan Otonomi Desa di Sebuah Komunitas Tepi Hutan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah’. Renai: Kajian Politik Lokal dan Sosial-Humaniora. Pustaka Perak. No 2 Hal 175-229.
- Sitorus, Felix. 1998. Penelitian Kualitatif ‘‘Suatu Perkenalan’’. Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial untuk Laboratorium Sosiologi, Antropologi, dan Kependudukan, Jurusan Ilmu Sosial dan Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB.
- Sitorus, MT. Felix. 2006. ‘Reklam Tanah Hutan, Tipe-Tipe Reforma Agraria Dari Bawah di Dataran Tinggi Sulewasi Tengah’. Jurnal Pembaharuan Desa dan Agraria (Bogor). Volume III Tahun III.
- Sunito, Satyawan. 2010. Sosial Learning. Disampaikan dalam kuliah Komunikasi dan Manajemen Lintas Budaya Departemen SKPM, IPB, Bogor. Pada Tanggal 28 November 2010.
- Tobing, Donny. 2010. 100 Hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
<http://donnytobing.wordpress.com/2010/02/07/100-hari-pemerintahan-kib-jilid-ii/> (diakses pada 18 November 2010 pukul 17.00 WIB)
- Vel, Jacqueline dan Stepanus Makambombu. 2010. ‘Penggunaan Hukum Adat Terkait Tanah Pada Masa Kini di Samba, Nusa Tenggara Timur’. Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi Tentang Tanah, Kekayaan Alam, dan Ruang di Masa Kolonial dan Desentralisasi (Jakarta). Huma Press. Hal 213-248.
- Wicaksono, Muhammad Arya. 2010. Analisis Tingkat Partisipasi Warga dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus PT. Isuzu Astra Indonesia Assy Plant Pondok Ungu). Skripsi. IPB. Bogor.